




**BAB
2**

AKUNTABILITAS KINERJA



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan tersebut menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disesuaikan dengan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, RKT Tahun 2022, RKPD Tahun 2022, dan PK Tahun 2022. Pengukuran kinerja dalam laporan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya.



Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian indikator kinerja utama Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagai berikut,

1. Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

TUJUAN 1.1 :

Mewujudkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan 1.1 : *Mewujudkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan*

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA Th. 2020	CAPAIAN KINERJA Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	Na	60,96	58,66	58,63	99,95%	59,35	98,78%
Indek Resiko Bencana	Na	108,03	108,03	108,03	100%	108,03	100%
Indek Kualitas Lingkungan Hidup	67,39	64,04	57,78	63,22	109,4%	58,24	108,5%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					103,1%		102,4%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022



Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 1.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan 1.1

Capaian kinerja rata-rata tujuan 1.1 Tahun 2022 adalah sebesar 103,1% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU **Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah** tahun 2022 sebesar 99,95% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”

b. Angka capaian kinerja IKU **Indeks Resiko Bencana** tahun 2022 sebesar 100% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”

c. Angka capaian kinerja IKU **Indeks Lingkungan Hidup** tahun 2022 sebesar 109,4% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”

3. Analisis Pencapaian Kinerja Tujuan

a. Indeks Risiko Bencana

Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar berdasarkan data dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah sebesar 108,03, termasuk kelas risiko “Sedang”. Nilai ini tidak berubah jika dibanding tahun 2021 sebesar 108,03.

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 tercapai dari hasil akumulasi perhitungan 0,36 Indeks Kualitas Air (IKA) ditambah 0,405 dari Indeks Kualitas Udara (IKU) ditambah 0,219 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Rumusan perhitungan tersebut berdasarkan dari ketentuan pada Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.

Tahun 2022, diperoleh capaian Indeks Kualitas Air 55,71, Indeks Kualitas Udara 80,71 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 43,79.

Secara keseluruhan dan berdasarkan perhitungan dari rumusan hitung yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai IKLH tahun 2022 melebihi target yang telah ditentukan dalam Perubahan



RENSTRA Tahun 2018-2023, yaitu sebesar 63,22, dimana target IKLH tahun 2022 sebesar 57,78.

Dalam pencapaian Tujuan 1.1 didukung sasaran sebagai berikut :

- 1.1.1 Meningkatnya permukiman yang tertata.
- 1.1.2 Meningkatnya infrastruktur pelayanan publik.
- 1.1.3 Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonomian daerah.
- 1.1.4 Meningkatnya Mitigasi dan Penanganan Bencana.
- 1.1.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Tabel 3.3
Sasaran 1.1.1 : *Meningkatnya permukiman yang tertata*

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SASARAN Th. 2020	CAPAIAN SASARAN Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN SASARAN Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Persentase Kawasan Kumuh	0,52	0,39	0,62	0.55	88,7%	0,39	141%
Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	81,52	81,40	82	82	100%	83	98,7%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					94.35%		119,85%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 1.1.1

Capaian kinerja rata-rata sasaran 1.1.1 Tahun 2022 adalah sebesar 94,35% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.



2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Presentase Kawasan Kumuh tahun 2022 adalah sebesar 88,7% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- b. Angka capaian kinerja IKU Presentase Penggunaan Lahan sesuai peruntukan tahun 2022 sebesar 100% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

1) Prosentase Kawasan Kumuh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Maka pada tanggal 23 Mei 2019 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Tabel 3.4

**Perhitungan Pengurangan permukiman kumuh Kabupaten Karanganyar
Tahun 2022**

No	Kelurahan/ Desa	Luas kumuh	Luas Kumuh tahun 2022	Pengu ra ngan Luasa n Kumuh 2017	Pengu ra ngan Luasa n Kumuh 2018	Pengu ra ngan Luasa n Kumuh 2019	Pengu ra ngan Luasa n Kumuh 2020	Pengu ra ngan Luasa n Kumuh 2021	Pengu ra ngan Luasa n Kumuh 2022	Jumlah Luas Capaian Penang anan
1	Bolon	9.54	8.25	8.25	0	0	0	0	0	8.25
2	Gedongan	1.67	0	0	1.67	0	0	0	0	1.67
3	Ngasem	5.67	10.38	0	1.67	0	0	0	0	1.67
4	Brujul	3.77	1.2	0	0	3.77	0	0	0	3.77
5	Jaten	7.66	5.43	4.56	0	2.1	0	0	0	6.66
6	Jati	3.86	0	0	0	2.86	0	0	0	2.86
7	Ngringo	4.12	7.3	0	0	0	0	1.12	0	1.12
8	Delingan	3.52	10	0	0	2.52	1	0	0	3.52
9	Gayamdomp	5.57	0	0	5.57	0	0	0	0	5.57
10	Gedong	2.74	7	0	0	0.12	0	0	0	0.12
11	Karanganyar	2.07	0	2.07	0	0	0	0	0	2.07
12	Lalung	3.09	0.8	0	0	3	0	0	0	3
13	Popongan	2.22	0	0	0	2.22	0	0	0	2.22
14	Banjarharjo	13.27	0	0	1	0	1.2	1.2	0	3.4



15	Kaliwuluh	8.66	17.34	0	0	0	0.2	0	0	0.2
16	Kemiri	11.14	10	0	1.86	0	0	1	2.00	4.86
17	Malangaten	1.32	0	0	1.32	0	0	0	0	1.32
18	Pulosari	0.59	3.3	0	0.59	0	0	0	0	0.59
19	Kaling	1.57	4.3	0	1.57	0	0	0	0	1.57
20	Karangmojo	0.41	0	0	0	0.41	0	0	0	0.41
21	Pandeyan	1.27	2.61	0.28	0	0.99	0	0	0	1.27
22	Tawangman gu	4.06	4.06	0	0	0	0.3	0	2.00	2.3
23	Kalisoro	2.37	2.5	0	0	0	0.2	0	0.20	0.4
24	Nangsri	0	6.8	0	0	0	0	0	0.00	0
25	Alastuwo	0	6.1	0	0	0	0	0	0.00	0
		100.16	107.37	6.91	15.25	17.99	2.9	3.32	4.2	50.57

Capaian tahun 2022 : 50.57 (Ha)

Luas kawasan kumuh 2022

dibawah 10 Ha : 107.37 (Ha)

Sisa kawasan kumuh : 56.8 (Ha)

Presentase kawasan kumuh : $\frac{\text{Sisa luas kumuh}}{\text{Luas kawasan kumuh}} \times 100$

$$: \frac{56.8}{10354} \times 100\%$$

: **0.55%**

Semakin rendah persentase kawasan kumuhnya menunjukkan bahwa semakin sedikit pula kawasan kumuhnya dalam suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Tahapan pelaksanaan awal adalah melakukan pendataan kondisi awal (*baseline*) 7 Indikator Kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru, yang nantinya akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat



dilakukan secara bersama, termasuk kegiatan mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman yang berfokus pada penanganan kumuh. Kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan. Untuk mendukung perwujudan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan yaitu memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah. Adapun faktor yang mendukung penanganan permukiman kumuh antara lain pengembangan kelembagaan, strategi, dan kebijakan, pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi, pendanaan investasi infrastruktur dan pelayanan perkotaan, meliputi infrastruktur skala kawasan dan skala kabupaten/kota termasuk dukungan pusat pengembangan usaha dan infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan, dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis, dukungan program/kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana.

2) Presentase Penggunaan Lahan sesuai peruntukan

Penggunaan lahan sesuai peruntukan adalah bentangan lahan yang sesuai peruntukannya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan. ***Meningkatnya prosentase penggunaan lahan sesuai peruntukan menunjukkan bahwa jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan semakin meningkat.*** Pada tahun 2022 pengajuan permohonan ijin pemanfaatan ruang di Kabupaten Karanganyar sejumlah 250 yang disetujui 206 dan yang tidak disetujui 44. Perhitungan persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan berdasarkan pengajuan ijin yang masuk adalah sebagai berikut :



TOTAL PENGAJUAN	DISETUJUI	DITOLAK
250	206	44

Keterangan:

Total pengajuan yang disetujui = 206

Total pengajuan yang ditolak = 44

Total pengajuan = 250

Persentase penggunaan

lahan sesuai peruntukan = $\frac{\text{Total Pengajuan Yang Disetujui}}{\text{Total Pengajuan}} \times 100\%$
 = $\frac{206}{250} \times 100\%$
 = **82%**

Tabel 3.5

Sasaran 1.1.2 : Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SASARAN Th. 2020	CAPAIAN SASARAN Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN SASARAN Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan	75	76,35	76	76	100%	77	98,7%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					100%		98,7%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2022



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1.2 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 1.1.2

Capaian kinerja rata-rata sasaran 1.1.2 Tahun 2022 adalah sebesar 100% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan tahun 2022 adalah sebesar 100% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Pada tahun 2022 pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar yang dibangun, ditingkatkan maupun yang dipelihara sejumlah 3.255 dari total 4.270 bangunan. Perhitungan realisasi cakupan tingkat pembangunan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan adalah sebagai berikut :

INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEMERINTAHAN	INFRASTRUKTUR YANG DIBANGUN, DITINGKATKAN, DIPELIHARANA	INFRASTRUKTUR YANG TIDAK DITINGKATKAN
4270	3255	1015

Keterangan:

Total Infrastruktur Yang Dibangun Ditingkatkan Dipeliharana = 3255

Total Infrastruktur Yang Tidak Ditingkatkan = 1015

Total Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan = 4270

Cakupan	Tingkat		
Pembangunan	Infrastruktur	Total Infrastruktur Yang Dibangun	
Pendidikan,	Kesehatan,	<u>Ditingkatkan Dipeliharana</u>	X100%
Pemerintahan		Total Infrastruktur Pendidikan,	
	=	Kesehatan, Pemerintahan	
	=	$\frac{3255}{4270} \times 100\%$	
	=	76%	

Bangunan gedung pemeritahan yang berkualitas sesuai dengan fungsinya, andal, serasi, selaras dengan lingkungannya selamat, sehat, nyaman, dan memberikan kemudahan bagi penghuni dan/atau pengguna bangunan gedung, serta efisien, serasi, dan selaras dengan lingkungannya diperlukan perencanaan



suatu konstruksi bangunan yang baik, diperlukan pula landasan dan analisa struktur yang berpedoman pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Perencanaan dari suatu konstruksi bangunan gedung juga harus memenuhi persyaratan struktur bangunan gedung yang telah ditentukan, yakni kuat, kokoh dan stabil dalam memikul beban. Selain itu, terdapat persyaratan lain di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Setiap bangunan gedung, strukturnya haruslah memenuhi persyaratan keselamatan (*safety*) dan persyaratan kelayakan (*serviceability*) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
2. Setiap bangunan gedung haruslah memiliki kemampuan memikul beban yang telah diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, pengaruh korosi, jamur, maupun serangga perusak struktur bangunan gedung.
3. Dalam perencanaan struktur bangunan gedung terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung baik dari sub struktur maupun struktur gedung haruslah diperhitungkan dalam memikul Gempa Rencana sesuai dengan zona gempanya.
4. Struktur bangunan gedung harus direncanakan secara detail sehingga pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan tidak terjadi keruntuhan dan masih dapat memungkinkan pengguna maupun pengunjung bangunan gedung untuk menyelamatkan diri.
5. Apabila bangunan gedung terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi fluktuasi, maka struktur bawah bangunan gedung harus direncanakan mampu menahan gaya likuifaksi tanah tersebut.
6. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan gedung secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam pedoman/petunjuk teknis tata cara pemeriksaan keandalan bangunan gedung.
7. Perbaikan atau penguatan struktur bangunan gedung harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan gedung yang dilakukan oleh pengkaji teknis bangunan gedung maupun konsultan terkait



sehingga bangunan gedung selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur.

8. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur bangunan gedung seperti halnya penambahan struktur dan/atau penggantian struktur harus mempertimbangkan persyaratan keselamatan struktur sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
9. Pembongkaran bangunan gedung dilakukan apabila bangunan gedung sudah tidak laik fungsi dan membahayakan pengguna maupun orang lain. Setiap pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan juga harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat beserta lingkungannya.
10. Pemeriksaan keandalan bangunan gedung dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi bangunan dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang yang sesuai.

Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan gedung pemerintahan harus dilakukan secara berkala. Pemeriksaan keandalan bangunan tersebut ditujukan untuk menjamin bangunan gedung tetap memenuhi kriteria laik fungsi sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Untuk meminimalkan risiko kegagalan struktur bangunan gedung, maka diperlukan adanya suatu metode pemeriksaan keandalan bangunan gedung. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menegaskan bahwa setiap bangunan publik harus sudah mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF). SLF atau Sertifikat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai IMB dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasar hasil pemeriksaan dari instansi maupun penyedia jasa/konsultan SLF.



Tabel 3.6

Sasaran 1.1.3 : Meningkatkan infrastruktur pendukung perekonomian daerah

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SASARAN Th. 2020	CAPAIAN SASARAN Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN SASARAN Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan	75	78,42	76	76	100%	77	98,7%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					100%		98,7%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1.3 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 1.1.3

Capaian kinerja rata-rata sasaran 1.1.3 Tahun 2022 adalah sebesar 100% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan tahun 2022 adalah sebesar 100% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Pada tahun 2022 pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan di Kabupaten Karanganyar yang dibangun, ditingkatkan maupun yang dipelihara sejumlah 2152 dari total 2822 aset jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan. Perhitungan realisasi cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan adalah sebagai berikut :



Infrastruktur Jalan, Irigasi, Perhubungan Dan Perdagangan	Infrastruktur Yang Dibangun, Ditingkatkan, Dipeliharana	Infrastruktur Yang Tidak Ditingkatkan
2822	2152	670

Keterangan:

Total infrastruktur yang dibangun ditingkatkan dipeliharana = 2152

Total infrastruktur yang tidak ditingkatkan = 670

Total infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan dan perdagangan = 2822

Cakupan pembangunan

$$\begin{aligned}
 &\text{infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan dan perdagangan} = \frac{\text{Total infrastruktur yang dibangun ditingkatkan dipeliharana}}{\text{Total infrastruktur yang tidak ditingkatkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{2152}{2822} \times 100\% \\
 &= 76\%
 \end{aligned}$$

Sasaran utama pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan di Kabupaten Karanganyar adalah guna meningkatkan sarana prasarana daerah yang memadai. Kegiatan yang diperlukan untuk menjadikan sarana dan prasarana daerah meningkat setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Pemeliharaan rutin infrastruktur adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi dengan kondisi pelayanan mantap. Contoh pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan pemeliharaan/pembersihan bahu jalan, Pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah), Pemeliharaan/pembersihan rumaja, Pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumija, Pengisian celah/retak permukaan (*sealing*), Laburan aspal, Penambalan lubang, Pemeliharaan bangunan pelengkap, Pemeliharaan perlengkapan jalan dan (*Grading operation / Reshaping*) atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.



Pemeliharaan berkala infrastruktur adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi infrastruktur dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Contoh pemeliharaan berkala meliputi kegiatan pelapisan ulang (*overlay*), Perbaikan bahu jalan, Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain *fog seal*, *chip seal*, *slurry seal*, *micro seal*, *strain alleviating membrane interlayer* (SAMI), Pengasaran permukaan (*regrooving*), Pengisian celah/retak permukaan (*sealing*), Perbaikan bangunan pelengkap, Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak, Pemarkaan (*marking*) ulang, Penambalan lubang, Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan.

Rehabilitasi infrastruktur adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu bagian dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Contoh Rehabilitasi jalan meliputi kegiatan :Pelapisan ulang, Perbaikan bahu jalan, Perbaikan bangunan pelengkap, Perbaikan/penggantian perlengkapan jalan, Penambalan lubang, Penggantian *dowel/tie bar* pada perkerasan kaku (*rigid pavement*), Penanganan tanggap darurat, Pekerjaan galian, Pekerjaan timbunan, Penyiapan tanah dasar, Pekerjaan struktur perkerasan, Perbaikan/pembuatan drainase, Pemarkaan, Pengkerikilan kembali (*regraveling*) untuk perkerasan jalan tidak berpenutup dan jalan tanpa perkerasan.

Rekonstruksi infrastruktur adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian infrastruktur yang dalam kondisi rusak berat agar bagian tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan atau Contoh kegiatan rekonstruksi sebagaimana dilakukan secara setempat meliputi kegiatan perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing, dan talud, Peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali, Perbaikan perlengkapan jalan, Perbaikan bangunan pelengkap.

Peningkatan infrastruktur merupakan penanganan guna peningkatan struktural dan atau geometriknya agar mencapai tingkat pelayanan yang



direncanakan atau dengan kata lain, peningkatan infrastruktur dilakukan untuk memperbaiki kondisi dengan kemampuan tidak mantap atau kritis menjadi infratraktur dengan kondisi mantap. Contoh pekerjaan peningkatan jalan terdiri atas peningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan, Peningkatan kapasitas merupakan kegiatan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

Pembangunan konstruksi baru adalah penanganan jalan dari kondisi belum tersedianya infratraktur sampai kondisi infrastruktur dapat berfungsi. Pekerjaan konstruksi baru juga berarti pekerjaan membangun infrastruktur baru yang mempunyai tahapan dimulai dari tahap perencanaan (*planning*), selanjutnya dilakukan studi kelayakan (*feasibility study*) dan perancangan detail design, kemudian tahap konstruksi (*construction*) dan diakhiri tahap pemeliharaan (*maintenance*).

Tabel 3.7
Sasaran 1.1.4 : Meningkatkan Mitigasi dan Penanganan Bencana

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SASARAN Th. 2020	CAPAIAN SASARAN Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN SASARAN Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Persentase Berkurangnya korban bencana alam	0,04	0,06	0,05	0,12	41,6%	0,05	41,6%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					41,6%		41,6%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1.4 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 1.1.4
Capaian kinerja rata-rata sasaran 1.1.4 tahun 2022 adalah sebesar 41,6% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Rendah”
2. Capaian kinerja IKU
Angka capaian kinerja IKU Persentase Berkurangnya korban bencana alam tahun 2022 sebesar 41,6% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Rendah”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Pada tahun 2022 realisasi presentase berkurangnya bencana alam sebesar 0,12%, menurun jika dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,06% dan dari target yang ditetapkan sebesar 0,05%.

Realisasi tahun 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan jumlah korban di tahun 2022 lebih besar dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh adanya cuaca ekstrem yang menyebabkan luapan sungai bengawan solo sehingga korban yang terdampak banjir cukup tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sedikit. Selain itu dampak cuaca ekstrem adalah terjadi angin ribut yang menyebabkan korban terdampak juga meningkat.

Tabel 3.8
Sasaran 1.1.5 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SASARAN Th. 2020	CAPAIAN SASARAN Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN SASARAN Th. 2021	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Indek Kualitas Udara (IKU)	80	72,36	75,30	80,71	107,18%	75,40	107,04%
Indek Kualitas Air (IKA)	69,41	56,67	52,70	55,71	105,71%	52,80	105,51%
Indek Kualitas Tutupan (IKTL)	42,02	63,33	34,12	43,79	128,34%	35,85	122,15%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					113,74%		111,57%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2022



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1.5. sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 1.1.5.

Capaian kinerja rata-rata sasaran 1.1.5 Tahun 2022 adalah sebesar 113,74% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Indek Kualitas Udara tahun 2022 sebesar 107,18% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

Angka capaian kinerja IKU Indek Kualitas Air tahun 2022 sebesar 105,71% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

Angka capaian kinerja IKU Indek Kualitas Tutupan Lahan tahun 2022 sebesar 128,34% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran 1.1.6. terdiri dari indeks kualitas udara, indeks kualitas air dan indek kualitas tutupan lahan.

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas, Indeks Kualitas Air telah melebihi target yaitu sebesar 55,71 dari target yang ditetapkan sebesar 52,70. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Indeks Kualitas Air tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dikarenakan titik lokasi pengambilan sampel air masih dilakukan di beberapa sungai, seharusnya pengambilan sampel air dilakukan di seluruh sumber air permukaan seperti sungai dan waduk dan diuji kualitasnya.

Indeks Kualitas Udara tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,71 dari target yang ditetapkan sebesar 75,30.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 43,79 dari target yang ditetapkan sebesar 34,12. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan mengalami penurunan, dikarenakan aturan baru tentang perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dalam PermenLHK No. 27 tahun 2021 yang memperketat kategori lahan untuk dasar perhitungan.

Capaian indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 yang merupakan tahun keempat RPJMD rata-rata memenuhi keseluruhan target yang sudah ditetapkan, bahkan persentase capaian melebihi target yang ditentukan.



Adanya IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) melebihi target, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

4. Efisiensi penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber Anggaran dalam pencapaian tujuan 1.1. antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan 1.1.

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Tujuan 1.1.

Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh						
Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	759,750,000.00	655,811,000.00	86.32	13.68
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1,923,370,000.00	1,836,648,600.00	95.49	4.51
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	627,000,000.00	600,108,880.00	95.71	4.29
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	270,000,000.00	262,266,500.00	97.14	2.86
	Jumlah		3,580,120,000.00	3,354,834,980.00	93.71	6.29
	Meningkatnya pemukiman yang tertata	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	40,000,000.00	39,579,500.00	98.95	1.05
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00	100.00	0.00
	Jumlah		1,300,000,000.00	1,299,579,500.00	99.97	0.03
	Meningkatnya infrastruktur pelayanan publik	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	1,520,000,000.00	1,497,620,000.00	98.53	1.47
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	61,909,151,000.00	56,742,870,335.00	91.66	8.34
	Jumlah		122,298,302,000.00	122,298,302,000.00	100.00	0.00
	Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonomian daerah	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1,715,306,000.00	1,677,688,800.00	97.81	2.19
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	630,000,000.00	573,890,670.00	91.09	8.91
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	887,800,000.00	878,289,900.00	98.93	1.07
	Jumlah		3,233,106,000.00	3,129,869,370.00	96.81	3.19
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	119,396,500.00	119,241,400.00	99.87	0.13



	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	72,695,000.00	71,152,000.00	97.88	2.12
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	54,840,000.00	54,264,000.00	98.95	1.05
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	57,585,000.00	57,350,620.00	99.59	0.41
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	155,000,000.00	153,664,300.00	99.14	0.86
	Jumlah	459,516,500.00	455,672,320.00	99.16	0.84

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan 1.1, sebagaimana tabel 3.10.

Tabel 3.10

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pemukiman yang tertata	94,35	99,97	0,03
	Meningkatnya infrastruktur pelayanan publik.	100	100	0
	Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonomian daerah.	100	96,81	3,19
	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	41,6	93,71	6,29
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	113,74	99,16	0,84

Berdasarkan tabel 3.10 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan 1.1 dengan capaian kinerja sasaran tinggi yaitu rata-rata lebih dari 85%, dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.



2. Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

TUJUAN 2.1 :

Meningkatnya Produktifitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.11

Tujuan 2.1 : *Meningkatnya Produktifitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah*

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA Th. 2020	CAPAIAN KINERJA Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	-1,87	3,57	3,6-4,5	5,87	163,06%	4,25-5	138,12%
Tingkat Inflasi	1,38	2,58	3,0±1	7,03	-34,33%	3,0±1	-34,33%
PDRB Perkapita (Rp.000)	41.485	41.710	28.780	45.500	158,1%	29.450	154,5%
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,86	5,89	5,85	5,70	102,56%	5,80	101,72%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					97,35%		90%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 2.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan 2.1

Capaian kinerja rata-rata tujuan 2.1 tahun 2022 adalah sebesar 97,35% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022 sebesar 163,06% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- b. Angka capaian kinerja IKU Tingkat Inflasi tahun 2022 sebesar -34,33% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Rendah”.
- c. Angka capaian kinerja IKU PDRB Perkapita (Rp.000) Tahun 2022 sebesar 158,1% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.



- d. Angka capaian kinerja IKU Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022 sebesar 97,4% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Tujuan
 - a. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 sebesar 5,87 persen, melebihi dari target terendah yang ditetapkan yaitu sebesar 3,6 persen. Pertumbuhan ekonomi selama 2022 terpicu oleh kenaikan mobilitas penduduk pasca covid. Baik mobilitas dalam pekerjaan maupun selain bekerja. Hal tersebut terutama mendorong pertumbuhan ekonomi pada kategori transportasi dan penyediaan akomodasi dan makan minum.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 70,54 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, ada satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negative yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar -4,76. Lapangan usaha yang lainnya mengalami pertumbuhan positif antara lain : lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar 2,15 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 2,12 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,64 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,85 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 1,44 persen, lapangan usaha Transportasi dan pergudangan sebesar 70,54 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 3,37 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 16,43 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 5,31 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,63 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,38 persen, Industri Pengolahan sebesar 4,11 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar -4,76 persen, Real Estate sebesar 4,58 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 2,25 persen.



b. Tingkat Inflasi

Untuk Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota yang dihitung tingkat inflasinya hanya 6 kota, yaitu kota Tegal, Cilacap, Purwokerto, Surakarta, Semarang dan Kudus. Tingkat Inflasi Kabupaten Karanganyar tahun 2022 (diambil dari kota Surakarta, mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan sebesar 3%, dan tercapai 7,03%. Kenaikan Inflasi ini disebabkan karena adanya kenaikan harga-harga yang ditunjukkan oleh naiknya angka indeks harga konsumen.

c. PDRB per kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita mengalami penurunan, dan kembali meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar 41.710 juta rupiah dan pada tahun 2022 sebesar 45.500 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 28.780.

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Karanganyar, 2018-2022

No	Nilai PDRB/GRDP	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	ADHB	34.324.380	37.014.752	37.074.423	39.158.453	43.116.960
2	ADHK	25.150.277	26.599.744	26.103.228	27.034.107	28.619.989
PDRB per Kapita						
1	ADHB	39.046	41.944	39.818	41.711	45,5
2	ADHK	28.610	30.142	28.073	28.796	30,201
	Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita	5,07	5,36	-6,86	2,57	4,88
Jumlah Penduduk		879.078	886.519	893.679	938.808	947.642
Pertumbuhan Jumlah Penduduk		0,86	0,39	5,37	0,97	0,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2022



d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2022 terdapat Pengangguran Terbuka sejumlah 28.810 orang, Angkatan kerja sejumlah 505.685 orang dan bukan Angkatan kerja 209.526 orang. Total Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja adalah 715.211 orang.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah Angkatan kerja sehingga diperoleh nilai TPT sebesar 5,70, artinya dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 5 – 6 orang diantaranya pencari kerja. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 sebesar 5,70 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,85. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja karena semakin kecil tingkat pengangguran terbuka menunjukkan semakin sedikit pengangguran. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 5,89, capaian tahun 2022 ini mengalami peningkatan.

Dalam pencapaian Tujuan 2.1 didukung oleh sasaran sebagai berikut :

- 2.1.1 Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan
- 2.1.2. Meningkatkan Produktivitas Sektor Akomodasi dan Makan Minum
- 2.1.3 Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan
- 2.1.4 Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan
- 2.1.5 Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
- 2.1.6 Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Tabel 3.12
Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2020	CAPAIAN KINERJA Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB	13,26	13,05	15,01	12,66	84,34%	16,01	79,08%
Sektor Pola Pangan Harapan	83,1	85,7	83,10	89,2	107.3%	84,30	105,8%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					95,82%		92,44%

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2.1.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran 2.1.1

Capaian kinerja rata-rata sasaran 2.1.1 Tahun 2022 adalah sebesar 95,82% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

b. Capaian kinerja IKU

a). Angka capaian kinerja IKU Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB tahun 2022 sebesar 84,34% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.

b). Angka capaian kinerja IKU Sektor Pola Pangan Harapan tahun 2022 sebesar 107.3% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “sangat tinggi.”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

1. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pada tahun 2021 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 13,05 persen, dan pada tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 12,66 persen. Terjadi penurunan sepanjang 5 tahun terakhir. Komoditi yang paling berpengaruh terhadap besaran nilai



tambah pada kategori ini adalah tanaman sayur dan peternakan. Komoditi di dalamnya yang paling dominan adalah komoditi wortel, sawi dan bawang dan ternak sapi. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2022 sebesar 2,85 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2018 hingga 2022) pertumbuhan yang dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan cukup berfluktuatif, dimana pada tahun 2018 pertumbuhannya mencapai 3,40 persen sedangkan pada tahun 2019 pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami perlambatan menjadi 1,80 persen, pada tahun 2020 mengalami perlambatan lagi 1,26 persen, tetapi pada tahun 2021 dan 2022 mengalami percepatan menjadi 2,16 persen dan 2,85 persen.

2. Skors Pola Pangan Harapan

Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) sangat berkaitan dengan pola konsumsi di masyarakat. Semakin beragam menu yang dikonsumsi oleh masyarakat maka nilai PPH akan semakin tinggi. Pada tahun 2022 keragaman konsumsi tercapai 107,3%, melebihi target yang telah ditetapkan. Kenaikan nilai PPH ini dipengaruhi oleh :

- a. Peningkatan penyuluh pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman di daerah oleh penyuluh Pertanian Lapangan bekerja sama dengan para kader PKK
- b. Kampanyae pola konsumsi B2SA melalui Lomba Cipta Menu B2SA di tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dan TP PKK Kabupaten Karanganyar, dan di ikuti oleh seluruh perwakilan TP PKK Kecamatan.
- c. Semakin membaiknya kondisi pasca pandemic Covid-19, khususnya di bidang ekonomi, sehingga masyarakat Kembali mampu menyediakan menu yang lebih beragam.

Semakin tinggi tingkat keberagaman pangan, semakin tinggi pula kecukupan gizi masyarakat. Semuanya akan bermuara pada semakin tingginya kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan keberagaman konsumsi pangan, maka harus terus mengkampanyekan penyusunan menu keluarga sesuai B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman) kepada para ibu selaku penyusun menu keluarga.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pola ketahanan pangan maka ditetapkan peraturan Bupati Karanganyar Nomor 126 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari. Pemanfatan lahan pekarangan melalui



kawasan rumah merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Kawasan rumah pangan lestari adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahan pekarangannya secara intensif untuk di manfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.

Tahun 2019 diterbitkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengembangan pangan lokal di Kabupaten Karanganyar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal pemerintah daerah perlu menetapkan dan mengembangkan jenis pangan lokal.

Tabel 3.13
Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya Produktifitas Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2020	CAPAIAN KINERJA Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	3,05	3,13	5,25	3,59	68,38%	5,5	65,27%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					68,38%		65,27%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2022



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2.1.2 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran 2.1.2

Capaian kinerja rata-rata sasaran 2.1.2 Tahun 2022 adalah sebesar 68,38% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sedang”

b. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB tahun 2022 sebesar 68,38% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sedang”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi berupa hotel (baik klasifikasi bintang maupun non bintang, pondok wisata, homestay, dll). Restoran, warung makan hingga kedai makan juga dicakup dalam kategori ini. Pada tahun 2017, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar sebesar 3,20 persen. Kontribusi tahun 2018 cenderung stabil bila dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 3,26 persen. Pada Tahun 2020 sebesar 3,05 persen, dan pada Tahun 2021 sebesar 3,13 persen. Secara keseluruhan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 7,39 persen pada tahun 2018. Laju pertumbuhan ini lebih cepat bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 5,31 persen. Peningkatan terjadi seiring dengan maraknya rumah makan dibangun di daerah wisata dan berdirinya beberapa hotel bintang di Kabupaten Karanganyar. Namun pada tahun 2020 kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019, yaitu sebesar 3,05 persen karena adanya pandemi covid-19, dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 3,13 persen, tahun 2022 mengalami peningkatan lagi sebesar 3,58 persen tetapi belum mencapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,25 persen.



Tabel 3.14
Sasaran 2.1.3 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Perdagangan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2020	CAPAIAN KINERJA Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-4	6,47	1,67	4,63	277,25%	1,70	272,35%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					277,25%		272,35%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2.1.3 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran 2.1.3

Capaian kinerja rata-rata sasaran 2.1.3 Tahun 2022 adalah sebesar 277,25% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

b. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2022 sebesar 277,25% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Pada tahun 2022 sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar sebesar 4,63 persen, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 1,67 persen, tetapi menurun dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 6,47.

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang perekonomian Kabupaten Karanganyar sebesar lebih kurang 5 persen, menurun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 6 persen. Sejak tahun 2016 perdagangan besar menunjukkan kenaikan kontribusinya terhadap kategori perdagangan ini, dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya pandemic covid-19. Pada tahun 2021 kembali menunjukkan kenaikan sebesar 6,47 persen dan pada tahun 2022 sedikit menurun sebesar 4,63 persen.



Tabel 3.15
Sasaran 2.1.4 : Meningkatnya Produktifitas Sektor Industri Pengolahan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2020	CAPAIAN KINERJA Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	-1,17	3,37	3,00	4,11	137%	3,20	128,44%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					137%		128,44%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2.1.4 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran 2.1.4

Capaian kinerja rata-rata sasaran 2.1.4 Tahun 2022 adalah sebesar 137% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

b. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan tahun 2022 sebesar 137% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Kategori Industri Pengolahan ini mencakup 16 sub kategori industri pengolahan, yaitu sub kategori Industri Batubara dan Pengilangan Migas, Industri Makanan dan Minuman, Industri pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang Dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmsi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang Logam,



Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur, dan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan. Kategori Industri Pengolahan dalam PDRB Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya selalu memberikan kontribusi terbesar. Dalam 5 tahun terakhir sebelum adanya pandemic covid-19, kategori industri pengolahan telah memberikan kontribusi diatas 45 persen, sangat mendominasi perekonomian di Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan minus sebesar minus 1,17 persen dikarenakan adanya dampak pandemi covid-19, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,37 persen. Penyumbang terbesar dari kategori industri pengolahan adalah industri kimia, farmasi dan obat tradisional dan industri tekstil dan pakaian jadi.

Pada tahun 2022 pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 4,11 persen melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,00 persen.

Tabel 3.16
Sasaran 2.1.5 : Meningkatkan Nilai Investasi Daerah

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2020	CAPAIAN KINERJA Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/Investor	49,89	6,08	0,25	27,165	10.866%	0,25	10.866%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					10.866%		10.866%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2022



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2.1.5 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran 2.1.5

Capaian kinerja rata-rata sasaran 2.1.5 Tahun 2022 adalah sebesar 10.866% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/Investor tahun 2022 sebesar 10.866% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Pada Tahun 2022, target persentase pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Karanganyar sebesar 0,25% tercapai sebesar 27,165% melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan penanganan kasus covid-19 oleh Pemerintah yang berkolaborasi dengan semua komponen masyarakat di Kabupaten Karanganyar berhasil dengan baik, sehingga pada triwulan ketiga dan keempat pergerakan ekonomi riil terus membaik dan para pelaku usaha dapat secara optimis merealisasikan investasinya.

Tabel 3.17

**DATA PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022**

A. Rekapitulasi dari NIB OSS

NO.	BULAN	REKAP NIB OSS UMK DAN NON UMK						JUMLAH
		2022						JUMLAH
		unit	Naker	IUMK	unit	naker	NON IUMK/ MENENGAH BESAR	
1	Januari	36	1.924	19.205.125.555	12	3.170	227.996.250.500	247.201.376.055
2	Pebruari	76	2.038	24.367.891.250	14	2.166	295.452.979.900	319.820.871.150
3	januari s.d Maret	60	1.334	28.867.573.222	20	1.704	356.780.500.441	385.648.073.663
4	April	240	772	18.585.660.000	71	495	276.147.932.288	294.733.592.288
5	Mei	242	818	20.964.787.000	42	821	159.140.470.965	180.105.257.965
6	Juni	403	1.302	28.656.838.888	77	6.050	265.579.541.900	294.236.380.788
7	Juli	349	1,459	57,276,498,487	31	3.544	330.702.182.902	387.978.681.389
8	Agustus	353	1406	59.011.414.102	25	2571	197.245.214.685	256.256.628.787
9	September	1310	3127	97.040.365.221	17	676	242.673.441.190	339.713.806.411
10	Oktober	1.365	3.043	28.866.882.900	14	1.365	66.711.279.939	95.578.162.839
11	Nopember	1.136	2.376	25.118.900.750	23	1.675	78.461.228.780	103.580.129.530
12	Desember	379	1.418	16.970.550.000	27	3.068	49.102.328.832	66.072.878.832
	JUMLAH =	5.949	21.017	424.932.487.375	373	27,305	2.545.993.352.322	2.970.925.839.697



B. Rekapitulasi Perusahaan PMA/PMDN (LKPM

No	URAIAN	INVESTASI / LKPM				KET.
				2022		
	PMDN	406		898.890.900.000		
	TRIB I	125		164.419.400.000		
	TRIB II	102		182.598.500.000		
	TRIB III	91		350.889.500.000		
	TRIB IV	88		200.983.500.000		
	PMA	31		222.163.862.443		
	TRIB I	7		192.518.190.374		
	TRIB II	10		23.090.589.005		
	TRIB III	8		416.150.034		
	TRIB IV	6		6.138.933.030		
	JUMLAH =	437		1.121.054.762.443		

Jumlah Potensi Investasi IUMK	5.949	424.932.487.375
Jumlah Potensi Investasi Non IUMK	373	2.545.993.352.322
Jumlah Investasi LKPM PMDN	406	898.890.900.000
Jumlah Investasi LKPM PMA	31	222.163.862.443
JUMLAH TAHUN 2022		4.091.980.602.140
REALISASI INVESTASI TAHUN 2021		3.217.848.028.623

Tahun n - (n-1 /th sebelumnya	X 100 %	
Tahun n – 1		
4,091,980,602,140 (-) 3,217,848,028,623	X 100%	874.132.573.517
3.217.848.028.623		3.217.848.028.623 27,16512917

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupaya untuk membenahi tata ruang dan regulasi pendukung perizinan di daerah strategis serta mendorong penyediaan infrastruktur daerah di lokasi strategis itu agar menarik minat investasi. Selanjutnya pada aspek pelayanan perizinan, pemerintah terus melakukan upaya penyederhanaan dan kemudahan perizinan berusaha serta meningkatkan kualitas pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat dan pertumbuhan investasi di daerah.



Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga telah membangun aplikasi SIMPEL guna optimalisasi pelayanan perizinan yang dapat diakses di alamat <https://simpel.karanganyarkab.go.id>. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat dapat secara mandiri atau pendampingan oleh petugas mengakses informasi jenis-jenis perizinan yang dilayani, tata cara pengurusan, pemantauan berkas pengajuan perizinan sampai dengan terbitnya dokumen perizinan, sehingga lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan adanya kepastian waktu penyelesaian perizinan.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Tahun 2020 diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi/investor di Kabupaten Karanganyar sehingga target dapat terpenuhi berdasarkan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Tabel 3.18

Sasaran 2.1.6 : Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2020	CAPAIAN KINERJA Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,55	73,15	74,51	70,70	94.9%	74,99	94.3%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					94.9%		94.3%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2022



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2.1.6 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran 2.1.6

Capaian kinerja rata-rata sasaran 2.1.6 Tahun 2022 adalah sebesar 94.9% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

b. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2022 sebesar 94.9% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Tingkat partisipasi Angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah total Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja sehingga diperoleh nilai TPAK sebesar 70,70 (94.9%) pada tahun 2022 dari target yang ditentukan pada tahun 2022 sebesar 74,51. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 73,15, maka capaian tahun 2022 mengalami sedikit penurunan.

Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari kerja) yang biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja.

Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Faktor-faktor lain yang mendasari tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara sosial maupun demografi serta ekonomi. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) Umur; (2) Status perkawinan; (3) Tingkat pendidikan; (4) Daerah tempat tinggal; (5) Pendapatan; (6) Agama. Pengaruh dari masing-masing faktor tersebut terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja berbeda antara penduduk satu dengan penduduk yang lain. Wanita dalam keputusannya untuk berpartisipasi dalam pasar



tenaga kerja selain dipengaruhi oleh status perkawinan juga dipengaruhi oleh faktor pendapatan, tinggi rendahnya pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga, umur dan pendidikan wanita itu sendiri. Wanita jaman sekarang sudah mulai berpikir jauh kedepan mereka kini berusaha mandiri demi untuk mendapatkan penghasilan sendiri sehingga tidak terlalu tergantung pada pasangan mereka.

Tabel 3.19

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karanganyar, 2022

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja Economically Active	296121	209564	505685
Bekerja/Working	279111	197764	476875
Pengangguran Terbuka Unemployment	17010	11800	28810
Bukan Angkatan Kerja Economically Inactive	55398	154128	209526
Sekolah/Attending School	23852	30018	53870
Mengurus Rumah Tangga Housekeeping	7898	104611	112509
Lainnya/Others	23648	19499	43147
Jumlah/Total	351519	363692	715211
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,26	94,37	94,30
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	84,24	57,62	70,70
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,74	5,63	5,70

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2023

4. Efisiensi penggunaan Anggaran :

Efisiensi penggunaan Anggaran dalam pencapaian tujuan 2.1. antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan 2.1.



Tabel 3.20
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Tujuan 2.1.

Misi 2: Pemberdayaan Perekonomian rakyat						
Meningkatnya produktifitas ekonomi dan daya saing daerah	Meningkatnya produktifitas sektor pertanian dan perikanan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00	0.00
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	45,000,000	44,760,000	99.47	0.53
		Pembangunan Prasarana Pertanian	4,698,146,000	4,319,918,200	91.95	8.05
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	90,000,000	90,000,000	100.00	0.00
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	55,000,000	54,850,000	99.73	0.27
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	70,000,000	69,670,000	99.53	0.47
		Jumlah		5,958,146,000.00	5,579,198,200.00	93.64
meningkatkan produktifitas sektor perdagangan		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9,974,000	9,974,000	100.00	0.00
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	135,000,000	134,376,800	99.54	0.46
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	5,000,000	0	0.00	100.00
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	40,000,000	39,534,500	98.84	1.16
		Jumlah		189,974,000.00	183,885,300.00	96.79
Meningkatnya produktifitas sektor industri pengolahan		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3,313,850,000	2,905,137,500	87.67	12.33
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	19,944,000	99.72	0.28
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	65,000,000	65,000,000	100.00	0.00
		Jumlah		3,398,850,000.00	2,990,081,500.00	87.97
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	30,000,000	29,558,500	98.53	1.47
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	410,000,000	408,600,250	99.66	0.34
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	85,441,000	84,597,000	99.01	0.99
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	22,816,000	22,778,500	99.84	0.16
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,365,575,600	1,257,583,700		
		Jumlah		1,913,832,600.00	1,803,117,950.00	94.22
meningkatkan nilai investasi daerah		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	393,394,000.00	388,473,000.00	98.75	1.25
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	75,000,000.00	71,236,500.00	94.98	5.02
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000.00	79,920,000.00	99.90	0.10
		Jumlah		548,394,000.00	539,629,500.00	98.40

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022



5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan 2.1, sebagaimana tabel 3.21.

Tabel 3.21

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Meningkatnya produktifitas ekonomi dan daya saing daerah	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan	95,82	93,64	6,36
	Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	277,25	96,79	3,21
	Meningkatnya produktifitas sektor industri pengolahan	137	87,97	12,03
	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	94,9	94,22	5,78
	Meningkatnya nilai investasi daerah	10.866	98,40	1,60

Berdasarkan tabel 3.21 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian sasaran kinerja pada tujuan 2.1 sangat memuaskan yaitu rata-rata melebihi 100%, dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.



3. Misi 3 : Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

TUJUAN 3.1 :

Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.22
Tujuan 3.1 : Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA Th. 2020	CAPAIAN KINERJA Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	75,86	75,99	76,19	76,58	100,5%	76,30	100,4%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					100,5%		100,4%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 3.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan 3.1

Capaian kinerja rata-rata tujuan 3.1 tahun 2022 adalah sebesar 100,5% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Indek Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 sebesar 100,5% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.



3. Analisis Pencapaian Kinerja Tujuan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karanganyar tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Karanganyar tahun 2022 adalah 76,68 atau tumbuh 0,59 poin dibandingkan capaian tahun 2021.

Peningkatan IPM Karanganyar tahun 2022 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya. Hal ini sedikit mengalami peningkatan dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2021, pemulihan pandemic COVID-19 telah menyebabkan pertumbuhan IPM dari pengeluaran per kapita telah merangkak naik dibanding tahun 2020.

Dari sisi Pendidikan, anak-anak di Kabupaten Karanganyar yang berusia 7 tahun pada tahun 2022, memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan seama 13,70 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu menamatkan Pendidikan hingga setingkat Diploma I atau Diploma II. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 13,69 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,22 tahun dari 8,57 tahun menjadi 8,79 tahun pada tahun 2022.

Dalam pencapaian IKU Indek Pembangunan Manusia (IPM) didukung sasaran sebagai berikut

- Meningkatkan kualitas pendidikan
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Tabel 3.23
Sasaran 3.1.1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SASARAN Th. 2020	CAPAIAN SASARAN Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN SASARAN Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Harapan Lama Sekolah	13,74	13,69	13,87	13,7	98.8%	13,98	98%
Rata-rata Lama Sekolah	9,2	8,57	8,67	8,79	101.4%	8,71	100.9%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					100.1%		99.45%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2022



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3.1.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 3.1.1

Capaian kinerja rata-rata sasaran 3.1.1 tahun 2022 adalah sebesar 100.1% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Harapan Lama Sekolah tahun 2022 sebesar 98.8% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Angka capaian kinerja IKU Rata-rata Lama Sekolah tahun 2022 sebesar 101.4% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

a. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja

Capaian realisasi indikator kinerja kunci Dinas pendidikan dan kebudayaan Tahun 2022 dapat dilihat pada table tersebut dibawah ini.

Tabel 3.24

**Capaian Realisasi Indikator Kunci Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2022**

NO	Indikator Utama	Realisasi 2021	2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Harapan lama Sekolah	13,69	13,87	13,7	98.8%
2	Angka Rata-rata lama Sekolah	8,57	8,67	8,79	101.4%

Dari tabel diatas, maka capaian tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021. Capaian indikator kinerja utama tersebut didukung oleh indikator sasaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut

:

Tabel 3.25

Indikator sasaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	2022	
			target	realisasi
1	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka partisipasi sekolah	95,15	99,61
2		Angka putus sekolah SD/MI	0,11	0,01
3		Angka putus sekolah SMP/MTs	0,20	0,04
4		Angka melanjutkan	95,15	99,61
5		Persentase fasilitas pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	80	83,45
6		Persentase fasilitas pendidikan SMP/MTs dalam kondisi baik	82	86,57

- b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2022

Tabel 3.26

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022		
				Target	realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan lama Sekolah	13,69	13,81	13,70	98,77%
		Angka Rata-rata lama Sekolah	8,57	8,66	8,79	101,38%

Pada tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Review Rencana Strategis dengan indikator-indikator baru untuk mendukung visi misi Pemerintah Daerah. Tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Program Pemerintah Daerah yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran rencana strategis Perangkat Daerah diharapkan dapat menambah Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karanganyar semakin tinggi, yang mana pada tahun 2022 merupakan tahun keempat melaksanakan pemerintahan dengan Kepala Daerah yang baru.

Pada pencapaian indikator Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)



pada tahun 2022 mencapai 13,70, meningkat 0,01% dibanding tahun 2021 sebesar 13,69%. Angka pada tahun ini turun sekitar 0,01% dikarenakan dukungan dari masyarakat Kabupaten setempat telah kembali sekolah dengan normal sehingga angka tersebut mulai naik, namun setelah diamati dengan angka putus sekolah jenjang SD dan SMP yang cenderung turun, sehingga yang mengakibatkan turun pada kemungkinan siswa jenjang di atasnya, yaitu SMA/SMK atau Perguruan Tinggi. Begitu juga dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2022 mencapai 8,79 tahun meningkat sebesar 0,22% dibanding pada tahun 2021 yang mencapai sebesar 8,57. Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2022 mencapai 99,61%. Sedangkan Angka Putus Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2022 mencapai 0,01, hal ini sama dengan tahun 2021, sedangkan angka putus sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)) terjadi penurunan 0,04% dibanding tahun 2021 mencapai 0,08%, pada tahun 2022 sebesar 0,04, Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2022 mencapai 99,61%, terjadi kenaikan sebesar 1,04% dari tahun 2021 sebesar 98,57%. Sedangkan ruang kelas yang sesuai Standar Nasional Pendidikan pada jenjang SD/MI pada tahun 2021 mencapai 81,45%, mengalami peningkatan sebesar 2% dibanding pada tahun 2022 yang mencapai 83,45%, untuk ruang kelas pada jenjang SMP/MTs yang sesuai Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2022 mencapai 86,57%, mengalami peningkatan sebesar 0,07% dibanding pada tahun 2021 yang mencapai 86,47%.

Tabel 3.27

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Data Capaian pada Tahun 2021
	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program		2021	2021	2021	2022	2023	
	(<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)		target	target	target	target	target	
1	2	3	4	5	6	7	z	17
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Angka Harapan lama Sekolah	13.66	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,70
	2. Angka Rata-rata lama Sekolah	8.49	8,0	8,15	8,17	8,20	8,8,25	8,79



d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Analisis Permasalahan
					Target	realisasi	Capaian	
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan lama Sekolah	13,66	13,81	13,69	99,13%	Adanya pendidikan gratis pada jenjang SD dan SMP dapat meningkatkan minat dan harapan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Sehingga dapat menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Hal ini perlu didukung sarana prasarana pendidikan yang memadai, walaupun capaian sudah melebihi 100% dari realisasi yang diperoleh namun masih jauh dibawah Standar Pelayanan Min yang diharapkan.
			Angka Rata-rata lama Sekolah	8,49	8,66	8,57	98,96%	



Tabel 3.28
Sasaran 3.1.2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2020	CAPAIAN KINERJA Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Usia Harapan Hidup	77,47	77,55	77,63	77,64	100,1%	77,84	99,74%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					100,1%		99,74%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3.1.2 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 3.1.2

Capaian kinerja rata-rata sasaran 3.1.2 tahun 2022 adalah sebesar 100,1% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

2. Capaian kinerja IKU

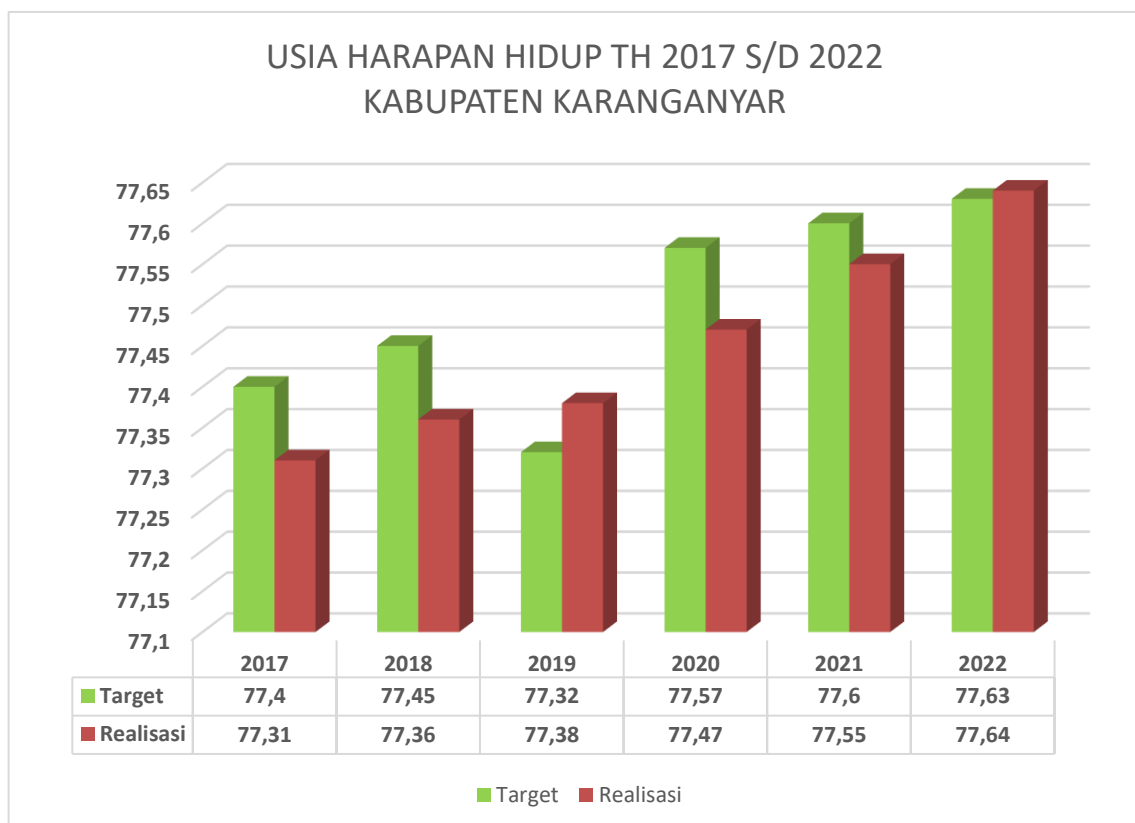
Angka capaian kinerja IKU Usia Harapan Hidup tahun 2022 sebesar 100,1% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan yang murah dan baik. Keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang kesehatan ditandai dengan semakin meningkatkan usia harapan hidup.

Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator kemampuan dalam meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan sosial ekonomi, fasilitas kesehatan, kecukupan gizi, dan kesehatan lingkungan. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari Grafik 3.1

Grafik 3.1
Usia Harapan Hidup Di Kabupaten Karanganyar



Kabupaten Karanganyar naik dari tahun ke tahun dan melebihi target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 untuk realiasi Usia Harapan Hidup tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini kemungkinan karena adanya pandemi covid 19 yang sedang melanda semua Negara didunia termasuk Indonesia dan Kabupaten Karanganyar. Karena pandemi covid 19 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. PHK karyawan serta pengurangan jam kerja karyawan yang berimbas pada penurunan daya beli masyarakat, serta adanya tatanan kesehatan yang harus meyesuaikan dengan adanya covid 19 tersebut. Dari segi kesehatan adanya pandemi covid 19 menyebabkan angka kematian juga meningkat. Pada tahun 2022 Usia Harapan Hidup di Kabupaten Karanganyar



mengalami kenaikan, walaupun sedikit. Target UHH tahun 2022 adalah 77,63, sedangkan realisasinya adalah 77,64 (100,01%). Hal tersebut salah satunya disebabkan dengan makin terkendalinya pandemi covid 19 dan semakin baiknya penanganan penyakit yang disebabkan oleh covid 19.

Peningkatan Usia Harapan Hidup menjadi salah satu indikator meningkatnya indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang mencapai 76,58 pada Tahun 2022. Jika dibandingkan IPM pada tahun 2021 sebesar 75,99, maka terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar.

4. Efisiensi penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber anggaran dalam pencapaian tujuan 3.1. antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan 3.1.

Tabel 3.29
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Tujuan 3.1

Misi 3 : Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis						
Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kualitas pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	21,529,375,500.00	20,198,637,400.00	93.82	6.18
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	89,384,382,624.00	87,610,088,545.00	98.01	1.99
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	52,329,115,756.00	47,524,908,173.00	90.82	9.18
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10,524,700,000.00	10,178,321,100.00	96.71	3.29
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	0.00
	Jumlah		173,777,573,880.00	165,521,955,218.00	95.25	4.75
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	408,732,200.00	404,394,200.00	98.94	1.06
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	45,265,126,750.00	39,429,813,005.00	87.11	12.89
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51,310,759,400.00	46,320,821,171.00	90.28	9.72
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	283,360,000.00	269,472,000.00	95.10	4.90
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174,400,000.00	159,472,000.00	91.44	8.56
Jumlah		97,442,378,350.00	86,583,972,376.00	88.86	11.14	

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022



5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja.

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan 3.1, sebagaimana tabel 3.30.

Tabel 3.30

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kualitas Pendidikan	100,1	95,25	4,75
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100,1	88,86	11,14

Berdasarkan tabel 3.30 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan 3.1, dengan capaian kinerja sasaran sangat memuaskan yaitu rata-rata melebihi 100%, dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.



4. Misi 4 : Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

TUJUAN 4.1 :

Terwujudnya Pemerataan Antar Desa

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.31
Tujuan 4.1 : *Terwujudnya Pemerataan Antar Desa*

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA Th. 2020	CAPAIAN KINERJA Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Indek Desa Membangun (IDM)	0,6919	0,6937	0,6852	0,7078	103,3%	0,6858	103,2%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					103,3%		103,2%

*Sumber: Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar
Tahun 2022*

Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 4.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan 4.1

Capaian kinerja rata-rata tujuan 4.1 tahun 2022 adalah sebesar 103,3% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Indek Desa Membangun (IDM) Kabupaten Karanganyar tahun 2022 (Capaian kinerja IKU akhir RPJMD) adalah sebesar 103,3% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian IKU

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi atau lingkungan.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam indeks desa membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Metode Penghitungan

1. Sumber Data

Pengambilan sampel dilakukan dengan pengambilan data pada seluruh desa dengan harapan mendapatkan gabungan secara keseluruhan terhadap status desa dan perkembangan desa.

2. Teknik Penghitungan

- a. Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 – 5.
- b. Penetapan skor berdasarkan hasil FGD *Analitycal Hierarcchy Process* (AHP)
- c. Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks

Rumus :

$$I_x = \frac{\sum_1^n Skor X}{n_x * 5}$$

- Misalkan : Indeks Ketahanan Lingkungan terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator kualitas lingkungan, indikator rawan bencana, dan indikator tanggap bencana. Desa Sukamaju memiliki skor kualitas lingkungan 4, skor rawan bencana 5, dan skor tanggap bencana 3. Maka, nilai indeks ketahanan lingkungannya berikut :

$$Indeks_{Lingkungan} = \frac{4 + 5 + 3}{3 * 5} = \frac{12}{15} = 0,8$$



- Penghitungan Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus :

$$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$$

- Ket : IDM (Indeks Desa Membangun)
IKS (Indeks Ketahanan Sosial)
IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi)
IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan)

Secara total nilai IDM pada Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan dari nilai indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan lingkungan, tetapi mengalami penurunan dari nilai indeks ketahanan ekonomi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar mencatat pada tahun 2021 realisasi IDM sebesar 0,6937 dan menargetkan pada tahun 2022 sebesar 0,6845, terealisasi sebesar 0,7078.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun pada Lampiran menjelaskan bahwa klasifikasi status desa dihasilkan berdasarkan indeks desa membangun dengan status kemajuan dan kemandian desa sebagai berikut :

- a. Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah Desa yang memiliki Indeks Desa membangun lebih besar dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki Indeks Desa membangun kurang dan sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa membangun kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5958.
- d. Desa Tertinggal atau Desa Pramadya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa membangun kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4507.



e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa membangun kurang dan lebih kecil dari 0,4907.

Berdasarkan indeks desa membangun dengan status kemajuan dan kemandirian desa maka desa yang ada di Kabupaten Karanganyar masuk dalam klasifikasi Desa Maju atau Desa Pra Sembada.

Dalam pencapaian IKU Indek Desa Membangun (IDM) didukung sasaran sebagai berikut.

Tabel 3.32
Sasaran 4.1.1 : Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SASARAN Th. 2020	CAPAIAN SASARAN Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN SASARAN Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Indeks Ketahanan Sosial	0,802	0,8056	0,7909	0,8227	104%	0,7919	103,88%
Indek Ketahanan Ekonomi	0,642	0,6388	0,6329	0,6648	105%	0,6339	104,87%
Indeks Ketahanan Lingkungan	0,632	0,6366	0,6317	0,6358	101%	0,6317	101%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					155%		155%

Sumber : Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

1. Capaian kinerja sasaran 4.1.1

Capaian kinerja rata-rata sasaran 4.1.1 tahun 2022 adalah sebesar 155% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Ketahanan Sosial tahun 2022 sebesar 104% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Angka capaian kinerja IKU Indek Ketahanan Ekonomi tahun 2022 sebesar 105% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.



- c. Angka capaian kinerja IKU Indeks Ketahanan Lingkungan tahun 2022 sebesar 101% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

a. Indeks Ketahanan Sosial

Pada tahun 2021 capaian sasaran Kabupaten Karanganyar pada indikator sasaran indeks ketahanan sosial sebesar 0,8056 dari target 0,7899 dan pada tahun 2022 dengan target sebesar 0,7909 terealisasi sebesar 0,8227, sehingga capaian sasaran Tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 103,88%.

b. Indeks Ketahanan Ekonomi

Pada tahun 2021 capaian sasaran kabupaten karanganyar pada indikator sasaran indeks ketahanan ekonomi sebesar 0,6388 dari target 0,6319, dan pada tahun 2022 dengan target sebesar 0,6329 terealisasi sebesar 0,6648 sehingga capaian sasaran Tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 104,87%.

c. Indeks Ketahanan Lingkungan

Pada tahun 2021 capaian sasaran kabupaten karanganyar pada indikator sasaran indeks ketahanan lingkungan sebesar 0,6366 dari target 0,6317, dan pada tahun 2022 dengan target sebesar 0,6317 terealisasi sebesar 0,6358 sehingga capaian sasaran Tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 101%.

4. Efisiensi penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber anggaran dalam pencapaian tujuan 4.1. antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan 4.1.



Tabel 3.33
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Tujuan 4.1.

Misi 4 : Pembangunan Desa sebagai Pusat pertumbuhan						
Terwujudnya pemerataan antar desa	meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1,259,811,000.00	1,258,029,000.00	99.86	0.14
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	300,000,000.00	296,343,100.00	98.78	1.22
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4,331,120,000.00	3,681,729,690.00	85.01	14.99
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	478,474,450.00	477,677,650.00	99.83	0.17
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4,331,120,000.00	3,681,729,690.00	85.01	14.99
		Penyelenggaraan Penataan Desa	225,000,000.00	219,532,700.00	97.57	2.43
		Jumlah		10,925,525,450.00	9,615,041,830.00	88.01

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan 4.1, sebagaimana tabel 3.34.

Tabel 3.34

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Terwujudnya pemerataan antar desa	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	155	88,01	11,99

Berdasarkan tabel 3.31 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan 4.1 dengan capaian kinerja sasaran sangat memuaskan yaitu rata-rata melebihi 100%, dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.



5. Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

TUJUAN 5.1 :

Terwujudnya Masyarakat yang Relegius, Berbudaya, Berprestasi, dan Kesetaraan Gender

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.35

Tujuan 5.1 : *Terwujudnya Masyarakat yang Relegius, Berbudaya, Berprestasi, dan Kesetaraan Gender*

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA Th. 2020	CAPAIAN KINERJA Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2012 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Nilai Kabupaten Peduli HAM	98,21	Na	80,50	78,25	97,20%	120	65,2%
Indeks Pembangunan Kebudayaan	88,3	89,39	80	94,49	118,11%	80	118,11%
Prestasi Pemuda dan Olah Raga	15	24	10	56	560%	15	373%
Angka Kemiskinan	10,28	10,68	9,26	9,85	93,51%	8,96	90,07%
IPG (Indeks Pembangunan Gender)	91,47	96,48	97,30	86,93	89,3%	97,35	89,3%
Indeks Reformasi Birokrasi	68,09	74,24	75	62,01	82,68%	80	77,51%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					172,63%		135,53%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dan Badan Pusat Statistik 2023



Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 5.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan 5.1

Capaian kinerja rata-rata tujuan 5.1 tahun 2022 adalah sebesar 172,63% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Nilai Kabupaten Peduli HAM Tahun 2022 sebesar 97,20% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2022 sebesar 118,11% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- c. Angka capaian kinerja IKU Prestasi Pemuda dan Olah Raga Tahun 2022 sebesar 560% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- d. Angka capaian kinerja IKU Angka Kemiskinan Tahun 2022 sebesar 93,51% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- e. Angka capaian kinerja IKU IPG (Indeks Pembangunan Gender) Tahun 2022 sebesar 89,3% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.
- f. Angka capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 sebesar 78,67% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian IKU

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, hal tersebut berdampak pada indikator pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang sebelumnya hanya terdiri atas 6 (enam) hak dengan 81 (delapan puluh satu), sejak tahun 2022 berubah menjadi 10 (sepuluh) hak dengan 115 (seratur lima belas) indikator yang terdiri dari :

a. Hak Sipil dan Politik

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Hak Bantuan Hukum | : | 6 indikator |
| 2. Hak Atas Informasi | : | 4 indikator |
| 3. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan | : | 5 indikator |
| 4. Hak Atas Keberagaman dan Pluralisme | : | 10 indikator |
| 5. Hak Atas Kependudukan | : | 6 indikator |

b. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 6. Hak Atas Kesehatan | : | 30 indikator |
|-----------------------|---|--------------|



7. Hak Atas Pendidikan : 20 indikator
 8. Hak Atas Pekerjaan : 11 indikator
 9. Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat : 10 indikator
 serta Hak Atas Perumahan yang Layak
 10. Hak Perempuan dan Anak : 13 indikator
 Jumlah : 115 Indikator

Dimana dalam satu indikator dapat meliputi beberapa indikator data yang harus disajikan.

Berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HAM-HA.02.02-17 tanggal 28 Juli 2021 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penilaian KKP HAM Tahun 2021, bahwa capaian indikator Kabupaten Peduli HAM tahun 2021 untuk Kabupaten Karanganyar Nihil dikarenakan pelaksanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) tahun 2021 ditiadakan dan baru akan dilaksanakan kembali tahun 2022.

Dalam pencapaian Tujuan 5.1 didukung sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.36

Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan Kualitas Keagamaan Dalam Keberagaman

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SASARAN Th. 2020	CAPAIAN SASARAN Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN SASARAN Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan	198	93	125	120	96%	120	100%
Persentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda	82,3	88	90	88,4	98.2%	92	96%
Persentase Pengendalian Kasus Konflik SARA (tidak ada kasus)	0	0	0	0	100%	0	100%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					98,07%		98,67%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2022



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.1.1 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 5.1.1

Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.1 tahun 2022 adalah sebesar 98,07% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan tahun 2022 sebesar 96% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Angka capaian kinerja IKU Presentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda tahun 2022 sebesar 98,2% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

c. Angka capaian kinerja IKU Jumlah Konflik Keagamaan/SARA tahun 2021 sebesar 100% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

d. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Pencapaian rata-rata kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Keagamaan dalam Keberagaman” tahun 2022 sebesar 98,07% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman, maka pada tahun 2021 telah dilaksanakan rehab Masjid Agung Karanganyar dengan anggaran dari APBD Kabupaten Karanganyar. Program Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Karanganyar ini merupakan salah satu program unggulan pencapaian Misi 5 Bupati Karanganyar.

Capaian indikator sasaran penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan tahun 2022 menunjukkan bertambahnya kasus yaitu sebesar 120 kasus dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 93 kasus, hal ini disebabkan karena :

1. kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terkait tentang Perbup Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penggunaan Sanksi Administratif sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah.

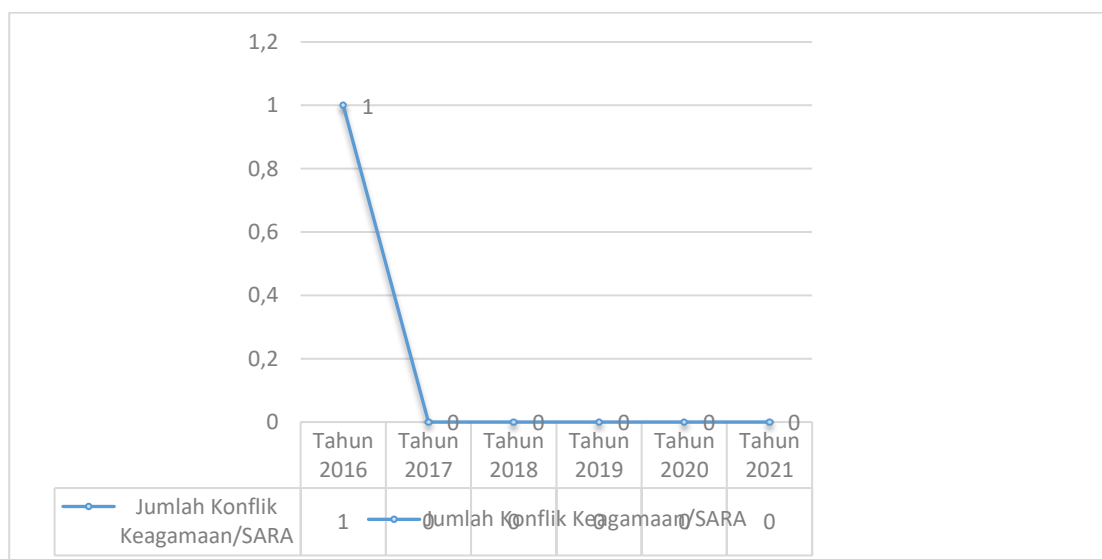


2. Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dicapai dengan peningkatan kinerja Satpol PP dalam melaksanakan penertiban dan patrol rutin di Kawasan rawan gangguan trantib di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Untuk capaian indikator presentase tertanganinya kasus pelanggaran Perda, pada tahun 2022 sebesar 88,4% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah kurang memahami tugas dan fungsi sesuai Perbup Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penggunaan Sanksi Administratif sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah.

Secara umum kondisi kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Karanganyar sepanjang tahun 2022 cukup kondusif. Konflik internal dan eksternal terkait Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) hampir tidak ada. Masyarakat hidup berdampingan secara baik. Bibit-bibit permasalahan konflik keagamaan/SARA dapat diantisipasi dengan baik oleh Pemerintah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dengan difasilitasi Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Karanganyar. Hal ini sejalan dengan nilai index kerukunan umat beragama tingkat nasional tahun 2021 sebesar 72,39% atau kategori “Baik”.

Grafik 3.2
Jumlah Konflik Keagamaan/SARA di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2016-2021



Sumber: *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2021*



4. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Dalam pencapaian IKU Indeks Pembangunan Kebudayaan didukung sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.37
Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SASARAN Th. 2020	CAPAIAN SASARAN Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN SASARAN Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	89,80	100	90,00	100	111.1%	90	111.1%
Persentase Kelompok Seni Budaya yang aktif	88,97	88,98	13,45	88,98	661,6%	13,75	647,1
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					386%		379%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.2.1 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 5.1.2

Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.2 tahun 2022 adalah sebesar 386% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif tahun 2022 adalah sebesar 661.6% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.



- a. Angka capaian kinerja IKU Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2022 adalah sebesar 111,1% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

- a. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Dalam sasaran Memajukan dan Melestarikan Adat dan Budaya Daerah, terdapat indikator Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Upaya pelestarian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tujuan utamanya adalah memperpanjang usia benda cagar budaya, situs atau kawasan peninggalan bersejarah dengan cara perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan atau pengembangan untuk menjaga keberlanjutan, keserasian dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan yang berkualitas. Pada tahun 2022, Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dapat sepenuhnya dilestarikan. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan pada tahun 2022 mencapai 111,1%, mengalami sedikit penurunan 1,89% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 112,99%.

- b. Persentase kelompok seni budaya yang aktif

Seni dan budaya merupakan elemen penting yang sangat diperlukan dalam kehidupan, karenanya perlu dilindungi dan dilestarikan, khususnya budaya jawa yang terancam hilang atau luntur. Melalui seni diharapkan mampu meningkatkan dinamika kehidupan, sedangkan melalui budaya diharapkan mampu memperkuat jati diri sehingga mampu menangkal pengaruh dari luar yang bersifat negatif.

Mengenai presentase kelompok seni dan budaya yang aktif pada tahun 2022 mencapai 661,6%, mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,04 dibanding pada tahun 2021 yang mencapai 661,56%.

Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dan dilestarikan berdasarkan pada data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan peningkatan yang signifikan selama enam tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2016 sejumlah 279 kelompok, tahun 2017 sejumlah



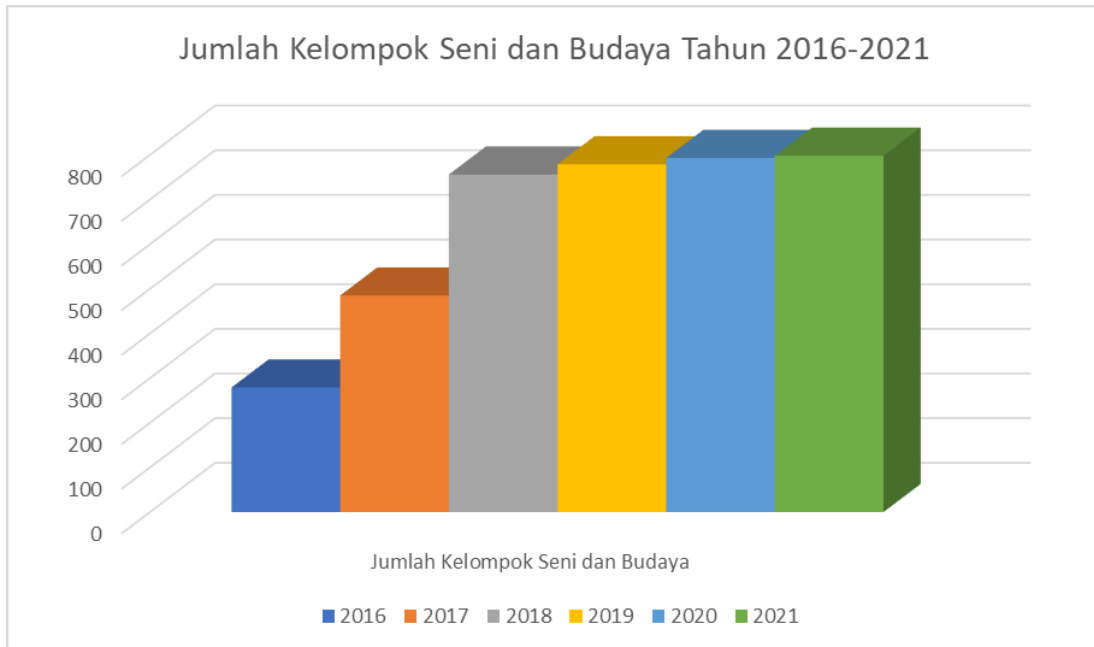
485 kelompok, tahun 2018 sejumlah 756 kelompok, tahun 2019 sejumlah 779 kelompok, tahun 2020 sejumlah 793 kelompok, dan tahun 2021 sejumlah 798.

Peningkatan jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dan dilestarikan yang signifikan ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mengembangkan dan melakukan pembinaan kebudayaan agar nilai dan karakteristik budaya khususnya budaya lokal tidak semakin memudar. Selain itu, Pemerintah juga memberikan stimulan berupa bantuan dana kepada sejumlah kelompok seni dan budaya untuk memicu kreativitas seni. Pemerintah juga banyak berkontribusi pada promosi *event* budaya dengan menggandeng para seniman untuk menyuguhkan kreasinya di perhelatan formal dimana event ini mulai dirintis dari ide kreatif serta memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki. Selain itu, proses regenerasi kesenian tradisional di kalangan warga harus secara kontinyu dilestarikan, mengingat bahwa perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional merupakan wahana dalam pengembangan pariwisata.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah membangun Gedung Kebudayaan dalam rangka mengembangkan dan melakukan pembinaan kebudayaan agar nilai dan karakteristik budaya khususnya budaya lokal tidak semakin memudar.

Pembangunan Gedung Kebudayaan ini merupakan salah satu program unggulan dalam pencapaian misi 5 Bupati Karanganyar.

Grafik 3.3
Jumlah Kelompok Seni dan Budaya Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

4. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Dalam pencapaian IKU Prestasi Pemuda dan Olah Raga didukung sasaran sebagai berikut

Tabel 3.38
Sasaran 5.1.3 : Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olah Raga

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SASARAN Th. 2020	CAPAIAN SASARAN Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN SASARAN Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Jumlah Prestasi Pemuda di Regional/Nasional/Internasional	0	4	5	2	40%	8	25%
Jumlah Prestasi Olah Raga di Regional/Nasional/Internasional	15	20	5	54	1080%	7	771%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					560%		398%

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar Tahun 2022



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.1.3 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran 5.1.3

Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.3 tahun 2022 adalah sebesar 560% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Jumlah Prestasi Pemuda di Regional/Nasional/Internasional tahun 2022 adalah sebesar 40% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Rendah”.

b. Angka capaian kinerja IKU Jumlah Prestasi Olah Raga di Regional/Nasional/Internasional tahun 2022 adalah sebesar 1.080% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

1). Jumlah prestasi pemuda di regional/nasional/internasional

Pada Tahun 2022, prestasi pemuda Kab. Karanganyar sejumlah 2 buah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Juara	Perlombaan	Tingkat
1	BURHAN EFENDI, S.P. MP	I	Pasangan Muda Inspiratif	Nasional
2	NURFITRI FATIMAH, S. Pd	I	Pasangan Muda Inspiratif	Nasional

Capaian belum mencapai target dikarenakan:

1. Minimalnya event kejuaraan kepemudaan yang dilaksanakan berjenjang dari tingkat regional maupun nasional tahun 2022.
2. Minimnya pemuda yang mengikuti kegiatan kejuaraan pemuda berprestasi ditingkat regional/ nasional/ internasional. Pada tahun 2022 hanya mengirimkan 1 event jambore pemuda tingkat provinsi yang dilaksanakan di Surakarta.
3. Kurangnya motivasi tambahan bagi pemuda berprestasi dalam bentuk reward.
4. Namun, dalam anggaran Tahun 2023 Pemerintah Kab. Karanganyar berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi pemuda-pemudi agar



selalu mengembangkan bakat dan kemampuannya serta kreatifitas untuk memberikan dampak kepada sekitar dan mencapai prestasi lebih tinggi. Selain itu juga bekerjasama dengan lembaga terkait dengan pembinaan dan pengembangan pemuda prestasi yang berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan untuk menjadi pelopor perubahan di Kab. Karanganyar dan diikuti berbagai event/perlombaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

2). Jumlah Prestasi Olahraga di regional/nasional/internasional

Pada tahun 2022, prestasi olahraga Kab. Karanganyar melebihi target dengan capaian sejumlah 54 medali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.39
Jumlah Prestasi Pemuda di Regional/Nasional/Internasional

NO	TINGKAT	CABANG OLAHRAGA	JUMLAH PRESTASI
1	NASIONAL	TAEKWONDO	12
		RENANG	13
2	PROVINSI	TAEKWONDO	17
		RENANG	3
		PANJAT TEBING	4
3	POPDA	SENAM	2
		SEPATU RODA	1
		TENIS MEJA	1
TOTAL			54

Capaian melebihi target dikarenakan:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
2. Adanya kerjasama antara lembaga terkait dengan pembinaan pemuda yang berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan
3. Adanya pembinaan olahraga prestasi melalui pembinaan atlet prestasi daerah yang bekerjasama dengan organisasi keolahragaan daerah dan diikuti berbagai event/perlombaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Hal ini sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi yang memiliki berjiwa kompetisi untuk



meningkatkan kemampuan tinggi dan memupuk raasa cinta olahraga. Selain itu juga sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet yang nantinya dapat menyumbangkan prestasi terbaik baik dikawasan regional, nasional, maupun internasional.

4. Pengembangan atlit berprestasi sangat didukung oleh pemerintah daerah dan telah dibuktikan dengan berbagai sarana prasarana olah raga yang dibangun dan direnovasi.
5. Adanya reward dan penghargaan dari Pemerintah Daerah untuk atlet berprestasi yang dapat memicu semangat untuk mencapai prestasi lebih tertinggi

6. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Dalam pencapaian IKU Angka Kemiskinan didukung sasaran sebagai berikut

Tabel 3.40
Sasaran 5.1.4 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SASARAN Th. 2020	CAPAIAN SASARAN Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN SASARAN Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Pengeluaran Perkapita	11,428	11,51	14,12	11,79	83,50%	15,45	76,31%
Persentase Penanganan PMKS	1,56	29,32	2,25	69,34	3081,7%	2,5	2774%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					1,582,6%		1.425,16%

Sumber : Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.1.4 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja sasaran 5.1.4
Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.4 tahun 2022 adalah sebesar 1.582,6% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- b. Angka capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.4 terhadap target akhir RPJMD adalah sebesar 1.425,16% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.



- c. Capaian kinerja IKU
- Angka capaian kinerja IKU Pengeluaran Perkapita tahun 2022 adalah sebesar 83,50.% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.
 - Angka capaian kinerja IKU Persentase Penanganan PMKS tahun 2022 adalah sebesar 3081,7% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- d. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
- Capaian kinerja sasaran untuk tahun 2022 diatas sebesar 3.081,7 atau kategori sangat baik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Sejumlah 55,035, Jumlah PMKS yang ditangani 38,162 orang atau 69,34%. Capaian penanganan PMKS pada tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan karena banyak program-program dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten sehingga capaian realisasi penanganan PMKS sangat tinggi, hal tersebut juga dijadikan dasar untuk merubah target persentase penanganan, PMKS ditahun mendatang.
7. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
- Dalam pencapaian IKU IPG (Indeks Pembangunan Gender) didukung sasaran sebagai berikut

Tabel 3.41
Sasaran 5.1.5 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Gender, dan Perlindungan Anak

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SASARAN Th. 2020	CAPAIAN SASARAN Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN SASARAN Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,66	74,29	74,81	73,38	98,09%	74,95	97.9%
Kabupaten Layak Anak	752	758	770	642,35	83,42%	780	82.35%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					90,76%		90.13%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.1.5 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran 5.1.5

Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.5 tahun 2022 adalah sebesar 90,76% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 adalah sebesar 98,09% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Angka capaian kinerja IKU Kabupaten Layak Anak tahun 2022 adalah sebesar 83,42% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan dari Perspektif gender digunakan beberapa indikator diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan adapun IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mendapatkan penghargaan **Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Pratama**. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan Peran Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan suatu Penghargaan terhadap prakarsa dan Prestasi yang dicapai dan menunjukkan kondisi kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.

Capaian sasaran tahun 2022 sebesar 98,09% terhadap target akhir RPJMD sebesar 97,91%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat



pemberdayaan perempuan dalam dunia politik dan ekonomi masih tinggi walaupun terdapat sedikit penurunan di tahun 2021 karena keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi mengalami penurunan.

b. Kabupaten Layak Anak

Setelah tidak ada penilaian karena pandemic covid-19 pada tahun 2020 pada tahun 2021 dan 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) kembali melakukan penilaian Indikator Kabupaten Layak Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mendapatkan penghargaan **Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya**, penghargaan tersebut tidak lepas dari komitmen yang baik oleh Pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar menjadi Kabupaten Layak Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mencatat target score Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2022 sebesar 770 dan terealisasi sebesar 642,35 meskipun skor yang diperoleh lebih rendah daripada tahun 2021 tetapi peringkatnya naik dari level Pratama menjadi Madya. Capaian sasaran tahun 2022 sebesar 83,42% dengan capaian sasaran tahun 2021 terhadap target akhir RPJMD sebesar 99,48%.



TUJUAN 5.2 :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.42

Tujuan 5.2 : *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA Th. 2020	CAPAIAN KINERJA Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Indeks Reformasi Birokrasi	58,94	75,61	75	62,01	82,68%	80	77,51%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					82,68%		77,51%

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 5.2 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan 5.2
Capaian kinerja rata-rata tujuan 5.2 tahun 2022 adalah sebesar 82,68 atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”
2. Capaian kinerja IKU
Angka capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 sebesar 78,67 atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Tujuan
Dalam pencapaian IKU Indeks Reformasi Birokrasi didukung sasaran sebagai berikut :



Tabel 3.43
Sasaran 5.2.1 : Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel, Efisien dan Efektif serta Pelayanan Yang Berkualitas

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SASARAN Th. 2020	CAPAIAN SASARAN Th. 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN SASARAN Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Indeks SPBE	3,02	2,40	3,37	3,32	98,5%	3,50	94,86%
Nilai SAKIP	67	67	80	68,67	85,84%	85	80,79%
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)/ASN	57,16	68,32	62,00	68,6	110,65%	65	105,54%
IKM Kabupaten	81,561	82,17	81,26	83,2	102,4%	81,67	101,9%
Maturitas SPIP	3,02	2,634	3	2,88	96%	3	96%
Indeks Arsip	80	45,09	83	64,36	77,5%	85	75,7%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					95,14%		92,47%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.2.1 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran 5.2.7

Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.2.7 tahun 2022 adalah sebesar 95,14% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”

2. Capaian Kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Indeks SPBE tahun 2022 adalah sebesar 95,04% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.



- b. Angka capaian kinerja IKU Nilai SAKIP tahun 2022 adalah sebesar 85,84% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.
 - c. Angka capaian kinerja IKU Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 adalah WTP atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
 - d. Angka capaian kinerja IKU Nilai Indeks Profesionalisme Pegawai(IPP)/ASN tahun 2022 adalah sebesar 110,65% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
 - e. Angka capaian kinerja IKU Nilai IKM Kabupaten tahun 2022 adalah sebesar 102,4% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
 - f. Angka capaian kinerja IKU Nilai Maturitas SPIP tahun 2022 adalah sebesar 96% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
 - g. Angka capaian kinerja IKU Nilai Indeks Arsip tahun 2022 adalah sebesar 77,5% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
- a. Indeks SPBE

Pemerintah menjamin terselenggaranya pelayanan publik dan wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik yaitu : kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Nilai indeks SPBE Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 yaitu sebesar 3,32 dengan predikat Cukup.

Nilai indeks tersebut meningkat dari evaluasi tahun 2021 yaitu sebesar 2,24, tetapi belum memenuhi target yang ditetapkan tahun 2022.

1. Penyebab belum terpenuhinya target nilai indeks SPBE tahun 2022:



- a. Belum tersedianya arsitektur SPBE Nasional sebagai pedoman pengembangan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
 - b. Belum tersedianya dokumen pendukung SPBE di Kabupaten Karanganyar, antara lain : arsitektur SPBE, Peta Jalan SPBE, Manajemen SPBE
 - c. Belum adanya integrasi aplikasi dan database antar OPD Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Pusat
 - d. Belum tersedianya anggaran khusus untuk mendukung pembuatan dokumen SPBE dan proses desk evaluasi SPBE ke semua OPD
2. Rencana Aksi Tindak Lanjut untuk meningkatkan nilai indeks SPBE tahun 2023 adalah sebagai berikut :
- a. Pada Tahun 2022 Diskominfo akan mengajukan Peraturan Bupati tentang SPBE, beserta keputusan turunannya antara lain pembentukan tim koordinasi SPBE, pembentukan Tim Admin SPBE di tiap OPD, dan pembentukan Tim Asesor SPBE internal.
 - b. Menyusun daftar API (penghubung layanan) instansi pemerintah pusat/daerah dengan aplikasi di Pemerintah kabupaten Karanganyar.
 - c. Mempersiapkan regulasi untuk Tim Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE.
 - d. Mempersiapkan audit TIK khususnya audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE.
 - e. Memperluas pengembangan jaringan internet ke semua OPD, karena sampai tahun 2021, dari 17 kecamatan yang terkoneksi dengan jaringan Diskominfo baru 7 kecamatan sedangkan untuk OPD lainnya sudah terkoneksi semua. Pada tahun 2022 ini akan dilakukan penambahan jaringan internet di 5 kecamatan sehingga masih ada 5 kecamatan lagi yang belum terkoneksi dengan jaringan Diskominfo, diharapkan tahun 2023 seluruh OPD sudah terkoneksi dengan jaringan internet Diskominfo.



f. Nilai SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dievaluasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan evaluasi untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2017 memperoleh nilai SAKIP 57,52 atau berpredikat CC, Tahun 2018 naik memperoleh nilai 62,38 atau berpredikat menjadi B, Tahun 2019 memperoleh nilai 65.02 atau predikat B, Tahun 2020 memperoleh nilai 67 atau berpredikat B, tahun 2021 memperoleh nilai 68,13 atau berpredikat B dan tahun 2022 memperoleh nilai 68,67 dari Kementerian PAN dan RB. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di bandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah menunjukkan hasil baik.

Rincian penilaian tahun 2022 sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15	10,67
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,70
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,67
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B



Prestasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan *good governance* di atas tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menciptakan situasi kondusif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan penyelenggara negara dan jajarannya melaksanakan tugasnya dengan baik. Lembaga negara harus memastikan berfungsinya lembaga hukum, sumber daya manusia dan perangkat hukum agar menjamin terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum melalui upaya penegakan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab.

c. Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berkaitan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020, setelah 6 (enam) tahun berturut-turut memperoleh opini yang sama pada Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Dengan diraihnya Opini WTP tersebut, berdampak positif bagi pembangunan daerah dan peningkatan kepercayaan publik atas kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Tantangan terbesar dalam mempertahankan opini WTP berturut-turut adalah penataan laporan keuangan dan aset. BPK menaruh perhatian besar pada administrasi keuangan yang akuntabel dan pengelolaan asset dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain mendapatkan predikat WTP oleh BPK RI, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga selama 4 (empat) tahun berturut-turut yaitu tahun 2014-2017 mendapat predikat “Sangat Tinggi” atas nilai hasil EKPPD terhadap LPPD. Selain mendapat predikat “Sangat Tinggi”, Pemerintah



Kabupaten Karanganyar meraih peringkat ke-2 secara nasional atas nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016 dan peringkat ke-3 atas nilai hasil EKPPD terhadap LPPD tahun 2017 dan 2018 dengan nilai “Sangat Tinggi”.

Dalam penyusunan LPPD, Pemerintah Kabupaten Karanganyar sangat *concern* terhadap dua poin krusial atau *critical point*. Yakni pertama, reliabilitas data, dan kedua, validitas data. Keduanya menjadi pedoman pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat dan benar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila data yang disajikan untuk dievaluasi dalam EKPPD tidak reliabel dan valid, maka hasil evaluasinya pun akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak tepat. Karena EKPPD pada prinsipnya bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggara pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan dan sebagai dasar Pemerintah untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah. Hasil pencapaian ini, dibuktikan Kabupaten Karanganyar dengan raihan penghargaan tertinggi tingkat nasional atas pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun berupa penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha pada tahun 2019.

d. Indeks Profesionalisme Pegawai(IPP)/ASN

Indek Profesionalisme Pegawai (IPP) ASN pada tahun 2022 ditargetkan mendapatkan nilai 62. Hasil rilis dari Badan Kepegawaian Negara pada 31 Maret 2021 terealisasi sebesar 68,32 melebihi dari target yang ditetapkan. Komponen IPP meliputi kualifikasi pegawai, kompetensi, kinerja dan disiplin.

e. Nilai IKM

Keberhasilan peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pemenuhan kebutuhan warganya atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif sangat ditentukan pada tingkat kepuasan



pelayanan publik yang disediakan. Salah satu bentuk pengukuran kepuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara kumulatif sebesar 83,2. Hal ini berarti IKM Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 berada dalam Nilai Interval (NI) IKM 3,0644-3,532 atau Nilai Interval Konversi (NIK) IKM 76,61 – 88,30, dengan kategori mutu pelayanan B (Baik).

Selanjutnya ke depan survei diharapkan sudah dilakukan pula di unit terkecil Perangkat Daerah, seperti Kelurahan dan UPT Dinas. Sehingga, hasil survei lebih menyeluruh dan dapat dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

f. Nilai Maturitas SPIP

Berdasarkan laporan hasil penilaian baseline maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (berkembang) dengan nilai 2,88. Hasil penilaian tersebut diperoleh dari hasil penilaian 3 komponen yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi.

g. Nilai Indeks Arsip

Untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dalam mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar (Misi 5) Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga Tolok ukur capaiannya Tercapainya Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien dan Efektif serta Pelayanan yang Berkualitas terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kunci di RPJMD yang terkait dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Karanganyar yaitu : Indeks Arsip.

Capaian Index Arsip tahun 2021 dengan **kategori KURANG, nilai 45,09 dan di tahun 2022 nilai meningkat menjadi 64,36 dengan kategori BAIK**. Peningkatan nilai didukung oleh faktor:



- a. Terpenuhinya pembangunan Depot Arsip Kabupaten Karanganyar
- b. Telah dilaksanakannya sosialisasi ke seluruh Perangkat Daerah dengan Kebijakan Tata Naskah Dinas dan Peraturan Bupati tentang SKKAAD, Klasifikasi Arsip, JRA, Fasilitatif dan Substantif program Arsip Vital, Perangkat Daerah juga telah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Pengorganisasian Kearsipan.
- c. Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan kearsipan ke seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan Ormas/Orpol.
- d. Telah melaksanakan akusisi arsip sebanyak 4x dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Dan yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah factor ;

- a. Penggunaan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) oleh Perangkat Daerah belum maksimal
- b. Pelaksanaan Alih Media Arsip belum dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Pembinaan Arsip Terjaga yang perlu mendapatkan perhatian serius.

4. Efisiensi penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber anggaran dalam pencapaian tujuan 5.1. dan 5.2 antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan 5.1. dan 5.2



Tabel 3.44
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Tujuan 5.1. dan 5.2

Misi 5 : Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan Olahraga						
Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11,282,946,000.00	10,882,090,428	96.45	3.55
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	901,756,500.00	883,090,700.00	97.93	2.07
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	976,080,000.00	954,853,900.00	97.83	2.17
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	973,920,000.00	932,388,050.00	95.74	4.26
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	6,213,853,800.00	5,797,558,550.00	93.30	6.70
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1,856,619,220.00	1,849,520,900.00	99.62	0.38
		Jumlah		22,205,175,520.00	21,299,502,528.00	95.92
Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,799,236,700.00	2,785,285,700.00	99.50	0.50
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	32,440,000.00	30,120,000.00	92.85	7.15
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	99,210,000.00	99.21	0.79
		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	930,000,000.00	924,600,000.00	99.42	0.58
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	638,323,300.00	635,758,300.00	99.60	0.40
Jumlah		4,500,000,000.00	4,474,974,000.00	99.44	0.56	
Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2,171,100,000.00	2,107,855,000.00	97.09	2.91
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8,528,500,000.00	8,500,000,000.00	99.67	0.33
Jumlah		10,699,600,000.00	10,607,855,000.00	99.14	0.86	
Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40,000,000.00	37,241,200.00	93.10	6.90
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	69,499,400.00	69,017,400.00	99.31	0.69
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4,684,320,600.00	3,596,924,860.00	76.79	23.21
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	105,000,000.00	100,619,000.00	95.83	4.17
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33,029,050.00	32,590,050.00	98.67	1.33
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39,518,700.00	0.00	0.00	100.00
		Jumlah		4,971,367,750.00	3,836,392,510.00	77.17



Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien serta pelayanan yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,000,000.00	34,262,318.00	97.89	2.11
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	410,900,000.00	406,395,600.00	98.90	1.10
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,771,318,000.00	1,704,401,127.00	96.22	3.78
		Administrasi Tata Pemerintahan	1,401,520,000.00	1,387,895,600.00	99.03	0.97
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,195,987,200.00	1,065,742,729.00	89.11	10.89
Jumlah		4,819,725,200.00	4,603,697,374.00	95.52	4.48	

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan 5.1 dan 5.2, sebagaimana tabel 3.45.

Tabel 3.45

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman	98,07	95,92	4,08
	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	386	99,44	0,56
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	560	99,14	0,86
	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak	90,76	77,17	22,83
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien serta pelayanan yang berkualitas	95,04	95,52	4,48

Berdasarkan tabel 3.45 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan 5.1 dan 5.2 dengan capaian sasaran kinerja sangat memuaskan yaitu rata-rata melebihi 100%, dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.



3.2 AKUNTABILITAS ANGGARAN

APBD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui KUA dan PPAS yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Karanganyar, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan daerah. RKPD kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang disusun dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan :

1. aspirasi masyarakat;
2. kinerja pemerintah daerah sebelumnya;
3. perkembangan dan arah kebijakan ekonomi nasional;
4. potensi daerah.

Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 menetapkan prioritas antara lain :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan publik.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2022 diprioritaskan pada :

1. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas;
2. Penguatan kebijakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif;



3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan

Struktur APBD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Tidak ada lagi klasifikasi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Dasar hukum penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023.
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.
3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023.
4. Peraturan Bupati Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 46); Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023.
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.



2.2.1. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk :

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui :
 - a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayanan Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
 - b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;
 - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja;
 - f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
 - g. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam Perda pajak dan retribusi;
 - h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
2. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;
3. Meningkatkan kontribusi BUMD/Perusda dengan upaya pengelolaan peningkatan profesionalisme BUMD/Perusda serta memperkuat BUMD/Perusda;
4. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;
5. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
 - . Tabel berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua) tahun berturut-turut :



Tabel 3.46
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2021

Uraian	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN - LRA	2.198.761.513.542,00	2.251.537.341.148,05	2.147.693.084.000,00	2.165.980.287.366,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	438.373.541.542,00	511.734.454.173,05	427.291.144.000,00	426.646.130.206,00
Pajak Daerah - LRA	190.150.000.000,00	225.008.130.128,00	174.850.000.000,00	176.873.002.208,00
Retribusi Daerah - LRA	7.221.662.000,00	8.653.396.564,00	10.039.888.000,00	10.039.888.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	18.096.123.000,00	18.096.196.748,00	14.834.409.000,00	14.834.409.000,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	222.905.756.542,00	259.976.730.733,05	227.566.847.000,00	227.566.847.000,00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.752.452.972.000,00	1.731.961.886.975,00	1.622.919.740.000,00	1.650.042.337.160,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.594.244.778.000,00	1.541.982.025.975,00	1.269.639.785.000,00	1.269.639.785.000,00
Dana Perimbangan - LRA	1.401.963.130.000,00	1.349.700.295.975,00	1.269.639.785.000,00	1.265.238.854.296,00
Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	22.407.052.000,00	22.407.052.000,00	42.634.697.000,00	42.634.697.000,00
Dana Desa - LRA	169.874.596.000,00	169.874.596.000,00	169.314.064.000,00	169.314.064.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	158.208.194.000,00	189.979.861.000,00	141.331.194.000,00	172.854.721.864,00
Pendapatan Bagi Hasil - LRA	142.533.194.000,00	177.559.691.000,00	132.533.194.000,00	165.757.129.864,00
Bantuan Keuangan - LRA	15.675.000.000,00	12.420.170.000,00	8.798.000.000,00	7.097.592.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	7.935.000.000,00	7.841.000.000,00	102.995.923.000,00	103.762.783.989,00
Pendapatan Hibah - LRA	7.935.000.000,00	7.841.000.000,00	102.995.923.000,00	103.762.783.989,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			0,00	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Tabel 3.47
Perbandingan Pendapatan Daerah Tahun 2022-2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
	Realisasi	Realisasi		
PENDAPATAN - LRA	2,251,537,259,148.05	2.165.980.287.366,00	85,553,510,576.10	3.95
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	511,734,454,173.05	426.646.130.206,00	85,084,862,761.10	19.94
Pajak Daerah - LRA	225,008,130,128.00	194.996.239.464,00	30,011,890,664.00	15.39
Retribusi Daerah - LRA	8,653,396,564.00	11.091.427.282,00	(2,438,030,718.00)	(21.98)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	18,096,196,748.00	14.701.590.403,00	3,394,606,345.00	23.09
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	259,976,730,733.05	205.856.873.057,00	54,116,396,470.10	26.29
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1,731,961,804,975.00	1.650.042.337.160,00	81,919,467,815.00	4.96
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1,541,981,943,975.00	1.265.238.854.296,00	64,794,328,679.00	4.39
Dana Perimbangan - LRA	1,349,700,295,975.00	1,269,639,785,000.00	84,461,441,679.00	(47.44)
Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	22,407,052,000.00	42,634,697,000.00	(20,227,645,000.00)	6.68
Dana Desa - LRA	169,874,596,000.00	169,314,064,000.00	560,532,000.00	0.33
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	189,979,861,000.00	141,331,194,000.00	17,125,139,136.00	9.91
Pendapatan Bagi Hasil - LRA	177,559,691,000.00	132,533,194,000.00	11,802,561,136.00	7.12
Bantuan Keuangan - LRA	12,420,170,000.00	8,798,000,000.00	5,322,578,000.00	74.99
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	7,841,000,000.00	89.291.820.000,00	(81,450,820,000.00)	(91.22)
Pendapatan Hibah - LRA	7,841,000,000.00	8.580.000.000,00	7,841,000,000.00	(8.61)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	80.711.820.000,00	(80,711,820,000.00)	(100.00)



Berdasarkan tabel 3.35 dan 3.36 realisasi pendapatan daerah tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp85.553.510.576,10 atau 3,95% dibandingkan realisasi pendapatan daerah Tahun 2021. Peningkatan realisasi pendapatan daerah yang paling signifikan terdapat pada kelompok pendapatan asli daerah sebesar Rp511.734.454.173,05 atau 19,94% karena program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

1. Permasalahan Bidang Pendapatan

Permasalahan Umum dalam Pendapatan Daerah, khususnya dalam hal Pendapatan Asli Daerah adalah :

- a. Miskinnya Sumber Daya Alam.
- b. Adanya beberapa aset / obyek Pendapatan Asli Daerah yang belum diserahkan sepenuhnya ke Kabupaten Karanganyar;
- c. Kesadaran para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah masih belum sesuai harapan kita;
- d. Situasi dan kondisi negara yang berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri yang selanjutnya akan berdampak terhadap kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi;
- e. Penentuan besarnya Alokasi Dana Perimbangan menjadi kewenangan Pemerintah Atasan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi.

2. Pemecahan Masalah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah supaya tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
- c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan.



- d. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi.
- e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan jalan :

1. Mengadakan rapat koordinasi pendapatan daerah secara berkala, agar dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicari jalan keluarnya;
2. Mengadakan pemantauan terhadap perkembangan masing-masing sumber pendapatan secara berkesinambungan untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan yang kontribusinya cukup besar dan masih dapat untuk ditingkatkan;
3. Mengadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah di bidang Pendapatan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
4. Menyusun Peraturan Daerah yang baru disesuaikan dengan potensi dan kewenangan daerah;
5. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan untuk menghindari adanya kebocoran penerimaan pendapatan daerah;
6. Menggiatkan penyuluhan-penyuluhan untuk menjadikan masyarakat lebih mengetahui kewajibannya sejalan dengan kebutuhan dana bagi Pemerintah;
7. Mendorong Penguatan Modal Usaha, Penyehatan dan Peningkatan Kinerja BUMD;
8. Pemanfaatan peluang melalui kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Dalam rangka penyusunan Belanja Daerah, agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia maka Pemerintah daerah menetapkan kebijakan umum anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :



1. Belanja Daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah dan memenuhi tuntutan dan kebutuhan publik;
2. Belanja daerah untuk memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. Belanja daerah untuk mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
4. Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
5. Belanja daerah yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah didasarkan pada standar satuan harga (terutama dalam pengadaan barang dan jasa). Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa;
6. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah (desa dan kelurahan) melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa atau Dana Kelurahan yang diarahkan untuk peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Belanja Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Arah kebijakan anggaran belanja Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pengelolaan Belanja Daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Prestasi Kerja untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan publik, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik;



2. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar satuan harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
3. Penganggaran untuk gaji dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemberian gaji ketiga belas maupun Tunjangan Hari Raya sebesar satu kali gaji. Di samping itu dianggarkan biaya penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD;
4. Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK);
6. Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan;
7. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN;
8. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud;



9. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar dan sejenis lainnya dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
10. Penganggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Di samping itu belanja modal dianggarkan sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan;
11. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Khusus penganggaran pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Pengelolaan belanja daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai validasi rencana belanja daerah yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya;
13. Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan melihat kapasitas serta substansi belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara komprehensif;



14. Penyusunan belanja daerah yang diproyeksikan kepada masing-masing SKPD didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan barang dan jasa) melalui analisis berdasarkan pada tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi beban keuangan daerah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa;
15. Belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun target dan realisasi dari belanja langsung dan tidak langsung Kabupaten Karanganyar dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut

:

Tabel 3.48
Realisasi Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 - 2021

Uraian	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	2,334,686,563,357.00	2,203,430,151,176.00	2.295.955.365.000,00	2.138.939.608.491,00
BELANJA OPERASI	1,688,850,417,051.00	1,590,938,004,729.00	1.714.076.310.630,00	1.598.110.030.136,00
Belanja Pegawai	1,009,925,152,305.00	953,878,284,210.00	957.166.908.660,00	916.916.841.224,00
Belanja Barang dan Jasa	577,021,708,026.00	543,169,427,462.00	631.532.233.310,00	561.260.052.375,00
Belanja Bunga	500,000,000.00	389,705,074.00	2.984.000.000,00	2.733.790.773,00
Belanja Hibah	88,104,590,920.00	83,224,021,300.00	74.811.893.120,00	71.394.673.320,00
Belanja Bantuan Sosial	13,298,965,800.00	10,276,566,683.00	7.221.185.000,00	5.554.605.008,00
BELANJA MODAL	283,543,216,106.00	253,014,014,897.00	233.624.744.570,00	193.819.710.155,00
Belanja Modal Tanah	295,000,000.00	276,392,400.00	916.300.000,00	19.259.680,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99,403,965,116.00	93,866,393,058.00	60.818.000.716,00	52.344.671.111,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112,433,090,000.00	97,226,667,698.00	126.636.765.475,00	101.554.104.714,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	51,550,714,000.00	41,999,788,425.00	24.497.239.000,00	19.334.579.100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19,860,446,990.00	19,644,773,316.00	20.756.439.379,00	20.567.095.550,00
BELANJA TAK TERDUGA	5,000,000,000.00	2,840,201,350.00	8.800.000.000,00	7.665.558.400,00
Belanja Tak Terduga	5,000,000,000.00	2,840,201,350.00	7.665.558.400,00	25.929.320.687,00
BELANJA TRANSFER	357,292,930,200.00	356,637,930,200.00	339.454.309.800,00	339.344.309.800,00
Belanja bagi hasil	20,016,732,800.00	20,016,732,800.00	16.702.722.000,00	18.488.988.800,00
Transfer Bantuan Keuangan	337,276,197,400.00	336,621,197,400.00	320.965.321.000,00	320.855.321.000,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022



Tabel 3. 49
Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2022 - 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
	Realisasi	Realisasi		
BELANJA DAERAH	320.855.321.000,00	2.138.939.608.491,00	64,490,566,087.00	3.02
BELANJA OPERASI	1,590,938,004,729.00	1.598.110.030.136,00	-7,172,002,005.00	(0.45)
Belanja Pegawai	953,878,284,210.00	957.166.908.660,00	-3,288,624,450.00	(0.34)
Belanja Barang dan Jasa	543,169,427,462.00	561.260.052.375,00	-18,090,601,511.00	(3.22)
Belanja Bunga	389,705,074.00	2.733.790.773,00	-2,344,085,699.00	(85.74)
Belanja Hibah	83,224,021,300.00	71.394.673.320,00	11,829,347,980.00	16.57
Belanja Bantuan Sosial	10,276,566,683.00	5.554.605.008,00	4,721,961,675.00	85.01
BELANJA MODAL	253,014,014,897.00	193.819.710.155,00	59,194,304,742.00	30.54
Belanja Modal Tanah	276,392,400	19.259.680,00	275,740,320.00	1,431.70
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93,866,393,058.00	52.344.671.111,00	41,521,721,947.00	79.32
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97,226,667,698.00	101.554.104.714,00	-4,327,437,016.00	(4.26)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	41,999,788,425.00	19.334.579.100,00	22,665,209,325.00	117.23
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19,644,773,316.00	20.567.095.550,00	-922,322,234.00	(4.48)
BELANJA TAK TERDUGA	2,840,201,350.00	7.665.558.400,00	-4,825,357,050.00	(62.95)
Belanja Tak Terduga	2,840,201,350.00	7.665.558.400,00	-4,825,357,050.00	(62.95)
BELANJA TRANSFER	356,637,930,200.00	341.512.816.028,00	17,293,620,400.00	5.10
Belanja Bagi Hasil	20,016,732,800.00	18.488.988.800,00	1,527,744,000.00	8.26
Belanja Bantuan Keuangan	336,621,197,400.00	320.855.321.000,00	15,765,876,400.00	4.91

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.37 dan 3.38 realisasi belanja daerah tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp64.490.566.087,00 dibandingkan belanja daerah tahun Anggaran 2021. Realisasi belanja modal tanah tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp275.740.320,00 dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah tahun 2021. Sedangkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar Rp4.327.437.016,00 dibandingkan dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2021.



2.2.2. Pembiayaan Daerah

a. Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan *netto* yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah.

Arah kebijakan umum pembiayaan yaitu adanya peningkatan pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah diharapkan terjadi surplus, jika setiap tahun terjadi surplus anggaran diharapkan penyertaan modal daerah setiap tahunnya selalu meningkat dan sisa lebih tahun anggaran dipergunakan untuk memperkuat posisi Kas Daerah.

Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Arah dan Kebijakan Umum pembiayaan daerah diharapkan untuk bisa surplus, apabila terjadi surplus anggaran maka diharapkan penyertaan modal daerah dapat ditingkatkan disamping itu posisi kas daerah akan terjamin atau likuid.

Dalam penganggarannya Pembiayaan daerah dianggarkan dalam dua bagian yaitu :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun padatahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup antara lain : sisa lebih perhitungananggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan danacadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.



b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup antara lain : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan sebagai imbalan atas diterimanya utang serta, perlu disesuaikan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan yang semakin besar menunjukkan defisit APBD yang semakin besar pula.

Kondisi pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua) tahun terakhir ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.50

Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 - 2021

URAIAN	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	175,425,049,815.00	175,629,729,814.95	177.762.281.000,00	177.880.886.332,00
Penggunaan SilPA	175,425,049,815.00	175,425,049,814.95	177.762.281.000,00	177.880.886.332,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	204,680,000.00	0,00	118.606.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39,500,000,000.00	39,457,159,600.00	29.500.000.000,00	29.500.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo	28,500,000,000.00	28,457,159,600.00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	135,925,049,815.00	136,172,570,214.95	148.262.281.000,00	148.380.886.332,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

Tabel 3.51

Kondisi pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 - 2021

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
	Realisasi	Realisasi		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	175,425,049,815.00	177.880.886.332,00	(2,251,156,517.05)	(1.27)
Penggunaan SilPA	175,425,049,815.00	177.880.886.332,00	(2,337,230,517.05)	(1.31)
Penerimaan Kembali Piutang	-	118.606.000,00	86,074,000.00	72.57
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39,500,000,000.00	29.500.000.000,00	9,957,159,600.00	33.7
Penyertaan Modal Daerah	11,000,000,000.00	9.500.000.000,00	1,500,000,000.00	15.79
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	28,500,000,000.00	20.000.000.000,00	8,457,159,600.00	42.29
PEMBIAYAAN NETTO	135,925,049,815.00	148.380.886.332,00	(12,208,316,117.05)	(8.23)

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022



Tabel 3.52
Realisasi Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
untuk Melaksanakan Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi	
Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh							
Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	992,483,200.00	981,602,555.00	98.90	1.10	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	620,000,000.00	608,022,700.00	98.07	1.93	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	130,000,000.00	130,000,000.00	100.00	0.00	
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	377,600,000.00	376,051,500.00	99.59	0.41	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	60,641,657,950.00	50,951,494,500.00	84.02	15.98	
	Jumlah		62,761,741,150.00	53,047,171,255.00	84.52	15.48	
	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	759,750,000.00	655,811,000.00	86.32	13.68	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1,923,370,000.00	1,836,648,600.00	95.49	4.51	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	627,000,000.00	600,108,880.00	95.71	4.29	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	270,000,000.00	262,266,500.00	97.14	2.86	
	Jumlah		3,580,120,000.00	3,354,834,980.00	93.71	6.29	
	Meningkatnya pemukiman yang tertata	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	40,000,000.00	39,579,500.00	98.95	1.05	
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00	100.00	0.00	
	Jumlah		1,300,000,000.00	1,299,579,500.00	99.97	0.03	
	Meningkatnya infrastruktur publik	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	1,520,000,000.00	1,497,620,000.00	98.53	1.47	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	61,909,151,000.00	56,742,870,335.00	91.66	8.34	
	Jumlah		122,298,302,000.00	122,298,302,000.00	100.00	0.00	
	Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonomian daerah	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1,715,306,000.00	1,677,688,800.00	97.81	2.19	
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	630,000,000.00	573,890,670.00	91.09	8.91	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	887,800,000.00	878,289,900.00	98.93	1.07	
Jumlah		3,233,106,000.00	3,129,869,370.00	96.81	3.19		
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	119,396,500.00	119,241,400.00	99.87	0.13		



		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	72,695,000.00	71,152,000.00	97.88	2.12
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	54,840,000.00	54,264,000.00	98.95	1.05
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	57,585,000.00	57,350,620.00	99.59	0.41
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	155,000,000.00	153,664,300.00	99.14	0.86
		Jumlah	459,516,500.00	455,672,320.00	99.16	0.84
Misi 2: Pemberdayaan Perekonomian rakyat						
Meningkatnya produktifitas ekonomi dan daya saing daerah	Meningkatnya produktifitas sektor pertanian dan perikanan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00	0.00
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	45,000,000	44,760,000	99.47	0.53
		Pembangunan Prasarana Pertanian	4,698,146,000	4,319,918,200	91.95	8.05
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	90,000,000	90,000,000	100.00	0.00
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	55,000,000	54,850,000	99.73	0.27
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	70,000,000	69,670,000	99.53	0.47
		Jumlah	5,958,146,000.00	5,579,198,200.00	93.64	6.36
meningkatkan produktifitas sektor perdagangan		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9,974,000	9,974,000	100.00	0.00
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	135,000,000	134,376,800	99.54	0.46
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	5,000,000	0	0.00	100.00
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	40,000,000	39,534,500	98.84	1.16
		Jumlah	189,974,000.00	183,885,300.00	96.79	3.21
Meningkatnya produktifitas sektor industri pengolahan		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3,313,850,000	2,905,137,500	87.67	12.33
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	19,944,000	99.72	0.28
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	65,000,000	65,000,000	100.00	0.00
		Jumlah	3,398,850,000.00	2,990,081,500.00	87.97	12.03
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	30,000,000	29,558,500	98.53	1.47
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	410,000,000	408,600,250	99.66	0.34
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	85,441,000	84,597,000	99.01	0.99
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	22,816,000	22,778,500	99.84	0.16
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,365,575,600	1,257,583,700		
		Jumlah	1,913,832,600.00	1,803,117,950.00	94.22	5.78



		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	393,394,000.00	388,473,000.00	98.75	1.25
	meningkatkan nilai investasi daerah	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	75,000,000.00	71,236,500.00	94.98	5.02
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000.00	79,920,000.00	99.90	0.10
		Jumlah	548,394,000.00	539,629,500.00	98.40	1.60
Misi 3 : Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis						
Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kualitas pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	21,529,375,500.00	20,198,637,400.00	93.82	6.18
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	89,384,382,624.00	87,610,088,545.00	98.01	1.99
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	52,329,115,756.00	47,524,908,173.00	90.82	9.18
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10,524,700,000.00	10,178,321,100.00	96.71	3.29
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	0.00
		Jumlah	173,777,573,880.00	165,521,955,218.00	95.25	4.75
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	408,732,200.00	404,394,200.00	98.94	1.06
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	45,265,126,750.00	39,429,813,005.00	87.11	12.89
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51,310,759,400.00	46,320,821,171.00	90.28	9.72
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	283,360,000.00	269,472,000.00	95.10	4.90
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174,400,000.00	159,472,000.00	91.44	8.56
	Jumlah	97,442,378,350.00	86,583,972,376.00	88.86	11.14	
Misi 4 : Pembangunan Desa sebagai Pusat pertumbuhan						
Terwujudnya pemerataan antar desa	meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1,259,811,000.00	1,258,029,000.00	99.86	0.14
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	300,000,000.00	296,343,100.00	98.78	1.22
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4,331,120,000.00	3,681,729,690.00	85.01	14.99
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	478,474,450.00	477,677,650.00	99.83	0.17
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4,331,120,000.00	3,681,729,690.00	85.01	14.99
		Penyelenggaraan Penataan Desa	225,000,000.00	219,532,700.00	97.57	2.43
	Jumlah	10,925,525,450.00	9,615,041,830.00	88.01	11.99	
Misi 5 : Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan Olahraga						
Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11,282,946,000.00	10,882,090,428	96.45	3.55
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	901,756,500.00	883,090,700.00	97.93	2.07
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	976,080,000.00	954,853,900.00	97.83	2.17



	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	973,920,000.00	932,388,050.00	95.74	4.26	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	6,213,853,800.00	5,797,558,550.00	93.30	6.70	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1,856,619,220.00	1,849,520,900.00	99.62	0.38	
	Jumlah	22,205,175,520.00	21,299,502,528.00	95.92	4.08	
Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,799,236,700.00	2,785,285,700.00	99.50	0.50	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	32,440,000.00	30,120,000.00	92.85	7.15	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	99,210,000.00	99.21	0.79	
	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	930,000,000.00	924,600,000.00	99.42	0.58	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	638,323,300.00	635,758,300.00	99.60	0.40	
	Jumlah	4,500,000,000.00	4,474,974,000.00	99.44	0.56	
Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2,171,100,000.00	2,107,855,000.00	97.09	2.91	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8,528,500,000.00	8,500,000,000.00	99.67	0.33	
	Jumlah	10,699,600,000.00	10,607,855,000.00	99.14	0.86	
Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40,000,000.00	37,241,200.00	93.10	6.90	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	69,499,400.00	69,017,400.00	99.31	0.69	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4,684,320,600.00	3,596,924,860.00	76.79	23.21	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	105,000,000.00	100,619,000.00	95.83	4.17	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33,029,050.00	32,590,050.00	98.67	1.33	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39,518,700.00	0.00	0.00	100.00	
	Jumlah	4,971,367,750.00	3,836,392,510.00	77.17	22.83	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien serta pelayanan yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,000,000.00	34,262,318.00	97.89	2.11
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	410,900,000.00	406,395,600.00	98.90	1.10
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,771,318,000.00	1,704,401,127.00	96.22	3.78
		Administrasi Tata Pemerintahan	1,401,520,000.00	1,387,895,600.00	99.03	0.97
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,195,987,200.00	1,065,742,729.00	89.11	10.89
	Jumlah	4,819,725,200.00	4,603,697,374.00	95.52	4.48	